

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
DALAM MENUNJANG AKTIFITAS PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LUMARING  
KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN  
LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



NIM: (17 0401 0051)

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
( 2023)**

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
DALAM MENUNJANG AKTIFITAS PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LUMARING  
KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN  
LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan Oleh**

**SARSENA**

NIM: (17 0401 0051)

**Pembimbing:**

**Humaidi, SE., M.EI**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
( 2023 )**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarsena  
Nim : 17 0401 0051  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan

SARSENA

Nim. 17 0401 0051

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Aktifitas Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Sarsena Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0051 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 19 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 29 September 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang (  )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang (  )
3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. Penguji I (  )
4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E. Penguji II (  )
5. Humaidi, S.E.I., M.E. Pembimbing (  )

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.  
NIP 1890715 201908 1 001

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt.yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *“Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)”* Setelah melalui proses yang panjang.



Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW,.Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi syariah dalam bidang fakultas ekonomi dan bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kedua orang tua ku tercinta ayahanda Hasan dan ibunda Sarmila yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji,M.Ag, beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III IAIN Palopo. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis meimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Dr. Anita Narwing, S.HI.,M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha S.EI.,M.EI, Wakil

Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan , Muhamaad Ilyas, S.Ag.,M.A, yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsi berbagai disiplin ilmu khususnya dibidang pendidikan ekonomi syariah

3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo Muhammad Alwi. S.Sy., M.EI dan Sekertaris Prodi Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E, beserta seluruh dosen yang banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ketahap penyelesaian studi.
4. Bapak Humaidi, S.EI., M.EI selaku pembimbing, Bapak Abd. Kadir Arno, S.E. sy., M.Si selaku penguji I dan Bapak Akbar Sabani. S.EI., M.E selaku penguji II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
6. Kepada Bapak Akbar Sabani, S.EI., M.E. selaku dosen PA kelas EKIS B yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ketahap penyelesaian studi
7. H. Madehang, S.Ag. M.Pd., selaku Kepala unit Perpustakaan IAIN Palopo serta para stafnya yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayah dan Ibu yang telah mengasuh, mendoakan, dan mendidik penulis dengan penuh kasi sayang sehingga penulis bisa sampai ketahap sekarang ini
9. Kepada Adek-adekku tersayang Bayu Saputra dan Nur Aisya dan seluruh keluarga besar yang telah medukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Pemerintah Desa Lumaring dan Masyarakat Desa Lumaring yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

11. Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah (Ekis B) angkatan 2017 khususnya Nur Hiqma yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung.
12. Kepada abang-abangku Rizki Aprilian, Hendi Kenang Diantoro, Fachry Rangga Maulana, Sidik, dan Wahyu yang selalu memberi masukan dan saran serta memberi banyak dukungan selama proses pengerjaan skripsi berlangsung.
13. Kepada sahabat-sahabatku Keluarga Besar Republic Relation Asmaul Putri, Supriadi, Diana Nopitasari dan Anti Septiani Wijaya. Terimakasih telah menjadi tempat curhat, berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah dan banyak membantu dan mendukung penulis selama pembuatan skripsi
14. Kepada sahabat-sahabat Leadis Egy Mustika dan Jusliani. Terimakasih telah menjadi telinga dan pundak yang selalu menguatkan dan memberi motivasi ketika sedang berada di posisi ingin menyerah dan selalu mendukung penulis selama proses penulisan skripsi berlangsung.
15. Kepada sahabat ku tercinta Andi Septiani Wijaya dan Rahma Novita Anggraini. Terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah akan semua hal, tempat berbagi kesedihan dan kesenangan, rumah terbaik untuk pulang dan banyak membantu serta memberi dukungan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
16. Semua pihak yang turut membantu dan terlibat serta tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini

menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 19 Juni 2023

Sarsena

Nim: 17 0401 0051





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### ***A. Transliterasi Arab-Latin***

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Esdengantitik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengantitik di bawah
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zedengantitik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Esdengantitik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengantitik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Tedengantitik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zedengantitik di bawah
ع	'Ain	'	Komaterbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ؤ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

- مَاتَ : māta
- رَمَى : rāmā
- قِيلَ : qīla
- يَمُوتُ : yamūtu

### 4. ى

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah

[t].sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, makatā' *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
5. الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجِينَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh: عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadibagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      بِاللَّهِ  
*dīnullāh*      *billāh*

adapuntā *'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)



## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
HR	= Hadis Riwayat
QS. Al-Anfal 8:53	= Qur'an Surah Al-Anfal 8:53
BUMDES	= Badan Usaha Milik Desa
ADD	= Anggaran Dana Desa
Inpres	= intruksi presiden



## DAFTAR ISI

<b>HALAM SAMBUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRNSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelittian Terdahulu Ynag Relevan .....	13
B. Kajian Teori .....	15
1. Pembangunan Desa .....	15
a. Pengertian Desa.....	15
b. Dasar-Dasar Pembangunan Desa .....	16
c. Karakter Pedesaan .....	17
d. Tipologi Desa .....	28
e. Otonomi Desa .....	20
f. Perencanaan Pembangunanana Desa .....	23

2. Pembangunan dan Infrastruktur .....	28
a. Pembangunan .....	28
b. Infrastruktur.....	31
3. Implementasi Kebijakan.....	36
C. Kerangka Pikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Definisi Istilah.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	44
G. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Analisis .....	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
1. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat .....	56
2. Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktut Di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	69

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. Asy-Syu'ara ayat 151-152.....	8
--	---



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sejarah Desa Lumaring.....	49
Tabel 1.2 Prasarana Umum Desa Lumaring .....	51
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk .....	53
Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	54
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir .....	39
Gambar 1.2 Struktur Pemerintahan Desa Lumaring .....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing

Lampiran 7 Hasil Uji Turnitin

Lampiran 8 Nota Dinas Verifikasi/Turnitin

Lampiran 9 Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 10 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 11 Riwayat Hidup



## Abstrak

**Sarsena 2023**, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktifitas Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)*. Skripsi program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Humaidi, S.EI., M.EI.

Skripsi ini berjudul *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktifitas Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)*. Adapun tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh langsung dari kepala desa, aparatur desa, dan masyarakat setempat di Desa Lumaring, data sekunder di peroleh dari buku-buku referensi, dokumen, dan internet. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lumaring dalam rangka menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di Desa Lumaring memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Lumaring meskipun masih ada beberapa pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. Adapun program pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di desa lumaring yaitu perbaikan akses jalan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, pembangunan drainase yang mempermudah masyarakat dalam menyalurkan air pada sawah dan perkebunannya, pembangunan talud bronjong yang bertujuan untuk memperkecil pengikisan tanah di pinggir sungai saat terjadi hujan deras dan banjir, pembangunan musollah untuk masyarakat agar memudahkan akses masyarakat untuk melakukan ibadah dan pembangunan posyandu untuk mempermudah pemeriksaan Kesehatan bagi ibu hamil dan anak, imunisasi, pemeriksaan gizi, dan pemeriksaan Kesehatan bagi orang tua atau lansia. Selain itu ada beberapa kendala atau faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Desa Lumaring di antaranya yaitu kontur jalan, dan kondisi cuaca yang tidak bisa di prediksi

**Kata Kunci:** *Pembangunan Infrastruktur Desa, Implemetasi, Perekonomian*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Undang-Undang desa yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 yang di sahkan dan diterbitkan pada tanggal 15 januari 2014, menunjukkan bahwa warga menghargai dan mengakui keberagaman desa. yang di maksud dengan bangunan desa dan pembangunan desa adalah dua aspek terpenting dalam UU Desa tentang pembangunan desa. Istilah Desa Berkembang mengacu pada kendali penuh desa atas urusannya sendiri untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri, pemerintah desa dan masyarakat berkolaborasi. Pembangunan desa merupakan bagian penting dari keberhasilan nasional.<sup>1</sup>

Pada masa sekarang, perencanaan pembangunan tampaknya menjadi tugas utama yang sedang dikerjakan oleh pemerintah guna mencapai modernisasi kemauan untuk menjadikan negara yang modern. Inilah yang membuat aktivitas pembangunan semakin bertambah bahkan rancangan serta pembangunan aktivitas tersebut kemudian diaplikasikan dengan bermacam-macam metode. Semacam pembangunan desa, pembangunan perkotaan, pembangunan daerah bahkan seluruh sektor mengalami pembangunan. Maraknya aktivitas serta program pembangunan belum sepenuhnya sanggup mensejahterakan bangsa dan negara.

---

<sup>1</sup>Badan Ramdan *Abcd Perencanaan Desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Inisiatif, 2014), 6

Di Republik Indonesia, undang-undang nomor 22 tahun 1999 menyatakan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.<sup>1</sup>

Pembangunan itu dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang terpusat pada rakyat dan pembuatan keputusan harus didesentralisasi. Strategi adalah taktik dalam melaksanakan tujuan tertentu prosedur yang mempunyai alternatif dalam berbagai langkah. Strategi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah rencana kegiatan yang teliti untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang diartikan sebagai suatu usaha mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan, awalnya digunakan dalam lingkungan militer namun istilah strategi digunakan dalam bidang yang memiliki esensi yang relatif sama.<sup>2</sup>

Menurut Gerald Michaelson strategi adalah suatu rencana yang akan diterapkan dengan melakukan berbagai hal yang tetap. Sedangkan menurut Siagian strategi adalah rangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dalam implementasi oleh seluruh jajaran atau organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, organisasi tersebut merumuskan strategi yang merupakan tujuan yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan

---

<sup>1</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 233

<sup>2</sup>Rosfa Nur Azizah, Skripsi: “*Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*” (Lampung Selatan: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 5

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan dalam dasar dan program, dan yang dimaksudkan oleh penulis strategi disini adalah bagaimana strategi Kepala Desa Lumaring dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur desa.

Kepala desa mempunyai tugas mengurus pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Untuk bimbingan dan pemberdayaan masyarakat desa kepala desa mempunyai wewenang dan memegang kuasa mengurus kewenangan dan aset desa serta mewujudkan ketenteraman dan keselamatan demi mewujudkan rasa nyaman dalam kehidupan masyarakat desa.

Kepala desa ialah pegawai desa yang bertanggungjawab terhadap segala aktivitas desa, kepala desa bukan saja bertanggungjawab atas kelancaran dan proses pemerintahan di desa tetapi juga bertanggungjawab terhadap sekitaran desa dengan keadaan dan situasi serta juga bertanggungjawab terhadap keselamatan dan ketenteraman desa dalam pimpinannya.

Pelaksanaan, perancangan dan pengawasan pembangunan Desa meliputi sistem pembangunan infrastruktur desa yang perlu mengikut sistem yang sudah ada di desa tersebut.

Dalam konteks Pembangunan Nasional dan Daerah pembangunan desa memiliki peran yang amat penting, saat sebuah desa sedang di bangun desa mempunyai kewajiban serta tanggung jawab guna menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat atau mengenal otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan desa di perlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

dalam menyelenggarakan pembangunan, di mana sumber pendapatan desa yang ada harus dikelola secara optimal agar pembangunan desa dapat terwujud dengan baik. Otonomi Daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap daerah, di mana daerah memperoleh kesempatan yang besar dari sisi finansial serta dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan daerah.<sup>1</sup>

Akumulasi dan pertanggung jawaban dana desa di atur oleh pemerintah desa sesuai dengan UU tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan Daerah tercantum dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Peraturan itu menjelaskan jika pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah paling utama pemerintah desa menganut asas *money follows function* (uang mengikuti fungsi), maksudnya peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan yang merupakan fungsi pemerintahan diikuti dengan pendanaan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang memimpin pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan aparat desa, berkuasa mengatur keuangan dan harta benda desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta membina kehidupan masyarakat desa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adisasmita, R., *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 11

<sup>2</sup> Annisa Inayatul Aini, Skripsi: "*Analisis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2009-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 7-8

Dalam melaksanakan validasi atau program harus didukung oleh sumber yang efisien untuk suatu pembuktian. Kenyamanan suatu legalisasi sangat bergantung kepada kemampuan untuk menggunakan sumber yang ada. Sumber adalah faktor penting untuk kenyamanan suatu legalisasi agar ia dapat berjalan dengan berkesan. Dalam aspek ini, ia bertujuan untuk mengetahui bagaimana kaitan sumber manusia atau tenaga kerja yang ada dengan pelaksanaan dasar program pembangunan infrastruktur dalam menunjang aktifitas perekonomian di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, prinsip-prinsip pembangunan harus diperhatikan, yaitu semua usaha dan aktivitas pembangunan wajib membawa manfaat sebesar-besarnya untuk manusia, peningkatan kesejahteraan serta pengembangan individu masyarakat.

Salah satu bentuk pengakuan Negara pada Desa merupakan penyediaan dan distribusi anggaran desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang penggunaannya dipakai untuk membiayai aktivitas pembangunan desa serta pemberdayaan warga pedesaan.

Perancangan dan pelaksanaan aktivitas dalam alokasi perancangan desa harus menunjukkan pengurusan yang terbuka dan bertanggung jawab. Pertanggung jawaban yang diperlihatkan secara fisik menunjukkan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara transparansi. Namun dengan demikian, hal ini juga memerlukan konfirmasi pembangunan yang lebih lanjut dari pihak

---

<sup>3</sup> Yoga Herianto et al, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur". *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 12, no 1 (16 April, 2021) : 25, <https://journal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/46323>

administrasi, kerana semuanya harus sepenuhnya mengikuti ketentuan yang sudah ada. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah anggaran yang dialokasikan untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan Kota. ADD menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

ADD saat ini diberikan seluruhnya kepada desa yang bersangkutan untuk merencanakan, melaksanakan dan melaporkan ADD yang di berikan oleh pemerintah pusat. Hal ini dimaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pedesaan, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperharikan prinsip demokratis, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Aturan Daerah Kepulauan Meranti No 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa, yang selanjutnya disingkat APBDessa, adalah rancangan keuangan tahunan desa yang dibahas dan disepakati Bersama oleh pemerintah dan Badan Permusyawarah Desa (BPD) yang diterapkan dengan peraturan desa. Dengan demikian bersumber dari dana

bagi hasil pajak daerah dan Sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa.<sup>4</sup>

Alokasi perencanaan desa adalah bukti pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya untuk berkembang dan maju seiring dengan pembangunan desa itu sendiri berdasarkan keberagaman, keterlibatan, otonomi asli, demokrasi, pandangan masyarakat dan meningkatkan peranan kerajaan desa dalam penyelenggaraan dan meningkatkan kebijakan masyarakat serta mencocokkan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis.

Adisasmita mengemukakan bahwa, pembangunan pedesaan memegang peran penting dalam kondisi pembangunan nasional sebab melingkupi beberapa besar wilayah nasional. Sekitar 65% masyarakat Indonesia bermukim di pedesaan. Dengan demikian, pengembangan masyarakat pedesaan perlu lebih ditingkatkan lagi lewat pengembangan kemampuan sumberdaya manusia di pedesaan, alhasil kreativitas serta aktivitas bisa lebih dikembangkan serta kesadaran akan lingkungan juga dapat ditingkatkan.<sup>5</sup>

jika berbicara masalah pembangunan tidak dapat di pisahkan dari pembangunan infrastruktur, secara umum pembangunan infrastruktur merupakan syarat mutlak bagi pembangunan termasuk pembangunan pertanian dan pedesaan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mahadin saleh et all, "Implementing Values of Local Wisdom in Managing the Budgets of Rular Fanancing at Poringan Village in West Suli District of Luwu Regency". *International Journal of Current Innovations in Advenced Reseach* 2, nomor 5 (19 Mei 2019): 29, <https://www.ijciar.com/index.php/journal/article/view/111>

<sup>5</sup> Adisasmita, R., *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006, 11

<sup>6</sup> Arif Satria et all, *Menuju Desa 2030* (Bogor: Crestpent, 2011), h. 232

Infrastruktur pada dasarnya adalah aset pemerintahan yang dibina dalam konteks akal sehat kepada masyarakat. Infrastruktur juga merujuk kepada sistem yang menyediakan kebijakan penting seperti pengangkutan, pengairan, saluran dan struktur lain untuk memenuhi keperluan asas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup>

Infrastruktur merupakan bahagian penting dalam proses pembangunan di suatu wilayah dan memainkan peranan dalam proses pengeluaran. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kebijakan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Jika sesuatu kawasan itu mempunyai infrastruktur yang baik, dapat dipastikan bahawa kawasan tersebut mempunyai keadaan ekonomi yang baik juga, sebaliknya jika sesuatu kawasan itu mempunyai infrastruktur yang lemah maka dapat dipastikan kawasan tersebut mempunyai ekonomi yang lemah kerana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur.<sup>9</sup>



<sup>7</sup> Florentinus Belareq, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tiring Lama Kecamatan Tiring Kabupaten Kutai Barat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, nomor 2 (2017): 706, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>

<sup>8</sup> Wika Gustina, Skripsi: "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Kumpeh Ulu)" (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 16

<sup>9</sup> Murba, Skripsi, "Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 4



Terjemahnya: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.<sup>10</sup>

Terkait dengan kandungan QS. Asy-Syu'ara ayat 151-152 ini telah dijabarkan oleh beberapa mufassirin salah satunya yaitu tafsirin Al-Muyassar/ kementerian agama saudi arabia yang menafsirkan bahwa bagaimana kita diperintahkan oleh sang pencipta (Allah SWT) untuk tidak tunduk kepada perintah orang-orang yang melewati batas terhadap diri mereka, dan tidak berhenti dalam bermaksiat kepada Allah SWT, yang berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan tanpa ada tindakan untuk memperbaikinya.<sup>11</sup>

Desa Lumaring menggunakan dana dari alokasi dana desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur. Desa lumaring telah menerima dana sebanyak Rp. 842.133.000 dan Rp. 241.343.600 dananya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur desa. Dimana untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Desa Lumaring dilihat dari infrastruktur apa saja yang akan di lakukan pembangunannya dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam penentuan pembangunan infrastruktur di Desa Luamaring pihak aparat desa melakukan rembuk desa terlebih dahulu lalu kemudian diusulkan dalam musyawarah desa (MUSDES) tahun berjalan dan selanjutnya di putuskan pada Musdes selanjutnya. Hal itu dilakukan untuk membantu aparat desa melihat apa saja permasalahan infrastruktur yang ada di desa. Adapun pihak yang hadir

<sup>10</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014),373

<sup>11</sup> Surah Asy-Syu'ara ayat 151 Arab, Latin, Terjemahan dan Tafsir, <http://tafsirweb.com/6561-surah-asy-syu'ara-ayat-151.html>

<sup>12</sup> Hamzah, Wawancara (Riset) Dengan Kaur Keuangan Desa Lumaring, Kantor Desa Lumaring, 8 November 2021

dalam Musdes untuk penentuan pembangunan infrastruktur selain aparat desa yaitu perwakilan dari kecamatan, perwakilan dari polsek, perwakilan dari koramil dan pendamping desa.<sup>13</sup>

Kondisi jalan di Desa Lumaring sudah memadai hanya saja ada beberapa tempat yang kondisi jalannya sangat rusak sehingga membuat aktivitas ekonomi masyarakat terbengkalai, salah satunya ketika hujan lebat semalaman maka masyarakat di desa tersebut tidak bisa melalui akses jalan karena jalanan sangat licin sehingga masyarakat di desa tersebut tidak bisa menyalurkan hasil panen dari kebunnya untuk di jual di pasar.

Atas dasar penjelasan yang telah di uraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lapangan dengan judul **“Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)”**.



---

<sup>13</sup> Ahmad Sahal, Wawancara (Riset) Dengan Sekretaris Desa Lumaring, Kantor Desa Lumaring, 21 September 2022

### ***B. Batasan Masalah***

Agar pembahasan tidak meluas maka penulis membatasi masalah ini pada program pembangunan infrastruktur jalan desa sehingga nantinya penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa dan apa yang mejadi faktor penghambat pembangunan infrastruktur desa dalam dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat?
2. Faktor-faktor Apa Saja yang menghambat pembangunan infrastruktur di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat?

### ***D. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

2. Untuk mengetahui apasaja faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

### ***E. Manfaat Penelitian***

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teorotis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca berdasarkan pembahasan masalah tentang Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat. Secara teoritis manfaat dari penulisan penelitian ini akan mengarah pada kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan dapat berfungsi sebagai titik fokus dan tolak ukur khususnya di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

#### 2. Manfaat Praktis

##### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan penulis serta digunakan sebagai salah satu ketetapan mendapatkan titel sarjana Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

##### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi terhadap penelitian selanjutnya (dimasa yang akan datang) yang membahas tentang pembangunan pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat

**c. Bagi Pemerintah Desa**

Penelitian ini diharapkan biasmenjadi suatu bahan pertimbangan untuk pemerintah desa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat khususnya di Desa Lumaring Kecamatan Larompong.

**d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat tentang pentingnya pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang perekonomian.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tujuan dari penelitian penting sebelumnya adalah untuk mendapat bahan referansi dan perbandingan serta untuk membangun hubungan antara posisi peneliti dan penelitian yang akan dilakukan oleh para sarjana serupa. Hal ini untuk menghindari kesamaan dalam penelitian sebelumnya, maka peneliti memasukkan hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wahyu Kurniawan dan Karjuni Dt. Maani (2019) menjalankan kajian dengan judul “Pelaksanaan Dasar Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Menggunakan Model Donald Van Meter Carl Van Horn”. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan dasar pembangunan infrastruktur jalan raya di Desa Muara Dalang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin menggunakan model Donald Van Meter Carl Van Horn memfokuskan kepada enam variabel yaitu standar tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial dan politik.<sup>1</sup>
2. Megawati Cindy Rorimpandey dan Ismail Nurdin (2019) melakukan penyelidikan berjudul “Pelaksanaan Dasar Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PIIP) di Desa Lopan Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten

---

<sup>1</sup>Wahyu Kurniawan dan Karjuni Dt. Maani, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Di Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Meter Carl Van Horn”.*Jurnal Mhasiswa Ilmu Administrasi Publik* 1, no 4 (2019) <https://jmiap.ppj.unp.ac.id>

Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi program perencanaan pembangunan infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Lopanan Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan belum berjalan secara optimal dikarenakan ditemukannya kondisi jalan yang rusak dan tidak sesuai dengan umur jalan disebabkan karena kurangnya dana dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga pengawasan pembangunan menjadi berkurang.<sup>1</sup>

3. Wika Gustina (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab. Muaro Jambi (Studi Kasus Kampeh Ulu)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi sangat di pengaruhi oleh infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur berpengaruh positif terhadap ekspansi ekonomi.<sup>2</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembangunan infrastruktur di desanamun yang menjadi pembeda yaitu dalam penelitian ini membahas tentang pembangunan dasar infrastruktur dengan beberapa model tertentu dan pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dalam penelitian yang di teliti penulis membahas mengenai bagaimana implementasi pembngunan infrastruktur dalam menunjang aktivitas perekonomian. Kemudian yang jadi pembedaan yang kedua adalah objek dan

---

<sup>1</sup>Megawati Cindy Rorimpandey dan Ismail Nurdin, “Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Lopan Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara”.*Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11, no 1 (Maret 2019) <https://ejournal.ipdn.ac.id>

<sup>2</sup> Wika Gustina, Skripsi: ”*Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Kumpeh Ulu)*” (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

tempat penelitiannya di mana peneliti ini dilakukan di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pembangunan Desa**

#### **a. Pengertian Desa**

Istilah desa berasal dari Bahasa India Sweden yang berarti tempat asal, kediaman, negara asal atau tanah leluhur yang merujuk kepada kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan norma dan sempadan yang jelas. Istilah kampung dengan desa sering dikaitkan dengan desa dan kampung berbanding bandar (bandar/bandar) dan bandar (bandar). Konsep bandar dan luar bandar merujuk kepada ciri-ciri masyarakat, manakala kampung dan bandar merujuk kepada kawasan pentadbiran, dalam hal ini kampung merangkumi beberapa kampung.<sup>3</sup>

R. Bintarto menurut aspek geografis mendefinisikan desa merupakan hasil perwujudan geografis yang dihasilkan dari unsur-unsure fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berkaitan satu sama lain dan juga dengan daerah lain.

Paul H Landis mengemukakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1). mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal
- 2). ada ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan, dan

---

<sup>3</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pertsada, 2015), 226



3). cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, misalnya iklim, topografi, dan sumberdaya alam.<sup>4</sup>

#### b. Dasar-Dasar Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan Pembangunan masyarakat kampung telah menjadi dua istilah yang mempunyai makna yang bercampur aduk. Walau bagaimanapun, mengikut definisi, mereka mempunyai makna yang sedikit berbeza. Sumarja berkata, pembangunan masyarakat luar bandar (community development) mempunyai usaha pembangunan yang hanya menjurus kepada manusia, manakala pembangunan desa (rural development) mengusahakan pembangunan masyarakat ditambah dengan alam sekitar.<sup>5</sup>

Pada dasarnya desa berwenang untuk melakukan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatan aktif masyarakat melalui prinsip pemberdayaan masyarakat. Sehingga titik temu pembangunan desa tidak hanya pada pemerintahan melainkan masyarakat yang ikut andil dalam melakukan pembangunan secara berkelanjutan demi kesejahteraan dimasa yang akan datang.<sup>6</sup>

Berpijak Daripada pemahaman umum nas al-Quran dan al-Sunnah, serta pandangan ulama, sekurang-kurangnya terdapat tiga syarat utama kepimpinan dalam Islam iaitu kesepaduan aspek keluasan ilmu, keutuhan akhlak (ketakwaannya individu) dan keupayaan profesional. Yang dimaksudkan dengan keluasan ilmu ialah seorang pemimpin bukan saja mampu menegakkan keadilan berlandaskan

<sup>4</sup>Totok Gunawan et al, *Fakta dan Konsep Geografi*, (Jakarta: Inter plus, 2018), 103

<sup>5</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pertsada, 2015), 240

<sup>6</sup> Marzellina Hardayanti dan Amalia Diamantina, "Urgensi Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no 1 (Februari 2022) <https://ejournal.undiksha.ac.id>, 338

prinsip dan peraturan syariah, tetapi juga mampu mengamalkan ijtihad dalam menyahut dinamika sosio-politik yang berlaku dalam masyarakat.

Jika semua syarat ini tidak dipenuhi, diperintahkan untuk mengambil ashlah (yang lebih utama). Sebagai contoh, jika umat Islam berhadapan dengan situasi memilih salah satu daripada dua pilihan yang buruk yaitu antara pemimpin yang soleh tetapi tidak mahir dan pemimpin yang berkemampuan tetapi kurang bertaqwa, menurut Ibn Taimiyyah, memilih pemimpin yang berkebolehan walaupun kurang bertaqwa. Kerana pemimpin yang bertakwa tetapi tidak berwibawa itu hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi ketidak mahirannya merugikan masyarakat, sebaliknya pemimpin yang berkebolehan dan tidak bertaqwa bermakna kemahirannya membawa manfaat kepada masyarakat manakala kekafirannya merugikan dirinya sendiri.

Pembangunan kampung dan pembangunan masyarakat kampung merupakan usaha yang dilakukan oleh kerajaan kampung dan masyarakat yang merangkumi kehidupan dan penghidupan. Pada dasarnya tujuan pembangunan desa adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### c. Karakter Pedesaan

Dalam beberapa penelitian, masyarakat perkotaan dan pedesaan dibedakan bersumber pada posisi geografis, kebiasaan, serta karakteristiknya. Menurut Roucek dan Warren, warga pedesaan mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- 1). Kelompok utama menempati posisi yang paling penting
- 2). Pembentukan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh faktor geografis,
- 3). Ikatan lebih kuat dan akrab
- 4). Masyarakat homogen
- 5). Mobilitas sosial yang rendah akan membuat keluarga lebih fokus pada perannya dalam perekonomian
- 6). Ada banyak anak dalam struktur popularitas.<sup>7</sup>

#### d. Tipologi Desa

Tipologi menggambarkan suatu jenis atau pola, ataupun sebagai pemaparan sesuatu bentuk bersumber pada kecocokan karakter serta kemampuan pada situasi sumber daya (alam, manusia, dan buatan) yang dimiliki oleh suatu desa, serta dapat juga dikaitkan dengan topografinya, pandangan, aktivitas ekonomi daerah yang dominan, kapasitas swadaya masyarakat, dan lain-lain. Berdasarkan aturan dalam negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang penyelenggaraan klasifikasi dan topologi desa di Indonesia digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

##### 1) Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang ditinggalkan atau diabaikan. Penduduk desa, biasanya hidup dalam kemiskinan dan terputus dari dunia luar. Orang-orang di desa ini terus mengikuti adat nenek moyang mereka, termasuk mengikuti tradisi dan hanya memenuhi kebutuhan paling dasar mereka. Berikut ini secara umum ciri-ciri desa swadaya:

---

<sup>7</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, 228

- a) Daerahnya terisolir atau tertutup
- b) Jumlah penduduk sedikit
- c) Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris
- d) Masyarakatnya menganut adat atau tradisi
- e) Hubungan individu yang amat dekat
- f) Minumannya alat serta infrastruktur yang tersedia
- g) Alat teknologi yang masi sedikit bahkan belum ada

## 2) Desa Swakarya (transisi)

Dibanding dengan desa swadaya, desa ini hadapi kemajuan yang lebih maju. Warga mulai menjajaki kemajuan era serta berasumsi lebih terbuka. Adat istiadat warga mulai hadapi pergantian sesuai dengan pergantian yang terjadi pada masyarakat. Kehidupan masyarakat mulai berubah dengan meningkatnya kesempatan kerja dan berkembangnya sarana dan prasarana di desa. Secara umum ciri-ciri desa swakarya yaitu:

- a) Tidak sepenuhnya terkait dengan adat
- b) Terbuka kepadapengaruh dari luar daerah
- c) tersedianyaalat kesehatan, pembelajaran, perekonomian serta infrastruktur penunjang lainnya.
- d) Teknologi sudah mulai digunakan oleh masyarakat
- e) Ada berbagai pekerjaan yang tersedia
- f) Akses ke daerah lain lebih mudah.

## 3) Desa Swasembada

Desa swasembada atau maju, di mana masyarakat desa ini telah sanggup

menggunakan serta meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk kegiatan pembangunan desa di bandingkan dengan tingkat desa lainnya, ekonomi masyarakat dan tingkat pendidikan lebih tinggi serta telah memungkinkan untuk meningkatkan gagasan mereka, pola pikir warga lebih modern. Ciri-ciri desa swasembada antara lain:

- a) Biasanya terletak tidak jauh dari kecamatan atau kota
- b) Jumlah penduduknya semakin padat
- c) Memiliki fasilitas yang lebih maju dan memadai
- d) Masyarakat tidak lagi terikat oleh adat
- e) Masyarakat yang lebih kreatif dan kritis
- f) Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.<sup>8</sup>

e. Otonomi Desa

Karena wilayah negara biasanya terdiri dari berbagai unit daerah yang masing-masing memiliki karakteristik uniknya sendiri termasuk kondisi tanah, iklim, flora dan fauna, praktik ekonomi, dialeg bahas, tingkat pendidikan dan faktor lainnya. Desentralisasi akan meningkatkan pemerintahan dan pengembangan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> “Tiga Tingkatan Klasifikasi Desa Berdasarkan Perkembangannya” 11 Desember 2018, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.berdesa.com/ini-dia-3-tingkatan-klasifikasi-desa-berdasarkan-perkembangannya/&ved=2ahUKEwishN7t0J70AhXmxTgGHalHCBQQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1K8Pqq1Im0eJtlKGIFEsuB>

<sup>9</sup> Rosfa Nur Azizah, Skripsi: “*Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*” (Lampung Selatan: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 32

Yang di maksud dengan otonomi desa di sini ialah autonomi kerajaan kampung dalam menguruskan kewangan kampung.<sup>10</sup> semangat tadbir urus yang baik yang berteraskan kecekapan, keberkesanan, ketelusan, akauntabiliti, dan tadbir urus menjadi asas kepada konsep autonomi kampung.<sup>11</sup> Pelaksanaan autonomi bukanlah pemberian kerajaan, tetapi autonomi yang lengkap dan lengkap, sebaliknya kerajaan wajib menghormati otonomi asal kampung.<sup>12</sup>

Dasar membangunkan autonomi daerah merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada semua pembangunan pemerintah daerah, wilayah dan negara, yang telah digariskan dalam berbagai dokumen perancangan jangka panjang. Manusia sebagai sumber bagi sesebuah organisasi tidak sama ciri-cirinya dengan sumber semula jadi dan kewangan. Sumber daya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk yang kompleks dan kesatuan jiwa dan raga, yang tidak dapat dilakukan sebagai dua sumber lainnya dalam kegiatan usaha. Sesebuah organisasi mesti mempunyai sumber manusia yang berdaya saing, supaya ia tidak mengalami kemunduran. Oleh itu, adalah perlu untuk melaksanakan salah satu aktiviti secara terancang dan mampan untuk membangunkan sumber manusia.<sup>13</sup>

Konsep mengenai otonomi desa pernah di kemukakan oleh Widjaja bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta buakan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban

<sup>10</sup> Wayan Gode Suacana, *Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2020, 25

<sup>11</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pertsada, 2015), 253

<sup>12</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2017), 164

<sup>13</sup> Wayan Gode Suacana, *Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2020, 25

menghormati otonomi asli yang di miliki oleh desa tersebut. Sebagai satuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata.

Pemahaman mengenai otonomi desa dipertegas oleh Talizidulu Ndraha yang menegaskan otonomi desa sebagai otonomi desa yang di klarifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada kemurahan hati pemerintah dapat berkurang. Selain itu posisi dan peran pemerintah desa di pulihkan dan dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masadepan.<sup>14</sup>

Konsep otonomi desa bukan merupakan kajian temporer sebagaimana yang di dalihkan dalam pengertian Undang-Undang Desa. Pengakuan desa sebagai otonom sudah mengalami tumbuh kembang sejak ratusan tahun lamanya. Hal ini diliha dari bebagai pranata hukum yang mengatur tentang desa mulai dari Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang.<sup>15</sup>

Undang-Undang Desa dan peraturan direvisinya, mengurai kewenangan desa sebagai daerah otonom yang sangat tegas dan komprehensif, selain itu desa merupakan pranata otonom maka penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan langsung oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) berdasarkan kewenangan atributif.

---

<sup>14</sup>Rono Wijayanto, Sri Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iawahyudi, “Pemerintahan Desa Dalam Karakteristik Otonomi Desa Di Siatem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no 2 (14 oktober 2022) <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id>, 374

<sup>15</sup>Firjal Firjal dan Alwadud, “Distorsi Otonomi Desa di Pulau Morotai”.*Jurnal Of Governance And Local Politics* 4, no 2 (2022) <https://ejournal.unpactio.ac.id>, 205

Keberhasilan pelaksanaan otonomi desa ditandai dengan semakin mampunya pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya otonomi desa maka hal ini akan menjadi pilar penting otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya otonomi desa.<sup>16</sup>

Otonomi desa merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adapun prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama di miliki oleh masyarakat desa dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Sudah selayaknya desa di percaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola pemerintahan desa melalui peraturan yang di buat secara mandiri.

Idealisasi teoritis tentang otonomi desa cenderung mengalami keterbatasan dalam level aktualitas. Problem otonomi desa seperti APBDes *Top Down*, *Uniformitas* program desa, perencanaan program pembangunan yang formalitas dan tidak optimalnya fungsi pembentukan peraturan desa merupakan dinamika yang sering terjadi pada tata kelolah pemerintahan desa.

#### f. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa sesungguhnya telah dianjurkan sejak lama, tetapi situasi desa belum memungkinkan untuk membuat perencanaan yang bagus. Dalam penerapan pembangunan, pemerintah desa sebagai penyelenggara

---

<sup>16</sup> Rono Wijayanto, Sri Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iawahyudi, "Pemerintahan Desa Dalam Karakteristik Otonomi Desa Di Siatem Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no 2 (14 oktober 2022) <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id>, 374



urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan wewenang yang besar, pemerintah desa harus mampu merumuskan rencana pembangunan desa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa. sesungguhnya, melibatkan ataupun keikutsertaan warga dalam pembangunan desa telah diawali dari program-program pemberdayaan. Program-program pemberdayaan ini dilaksanakan sebab terdapat pemikiran bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa kurang efektif. Program yang sudah ada seperti program PKK, PNPM dan lain sebagainya. Di mana program ini merupakan tahap awal dari upaya pembangunan desa lewat warga ataupun yang lebih dikenal dengan Community Development.

Perencanaan Pembangunan boleh dilihat berdasarkan elemen yang membentuknya yaitu perancangan dan pembangunan. Perancangan ialah memilih dan mengaitkan fakta dan membuat dan menggunakan andaian tentang masa depan dengan menghuraikan dan merumuskan aktiviti yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manakala pembangunan merupakan satu cadangan dan rentetan usaha pertumbuhan dan perubahan terancang yang dilaksanakan secara sadar oleh sebuah Negara, dan pemerintahan sekarang dalam konteks Pembangunan Negara. Definisi perancangan yang lain ialah memilih keutamaan atau alternatif untuk mencapai matlamat, memperuntukkan sumber, mencapai matlamat yang berkaitan dengan masa depan dan aktiviti yang dijalankan secara berterusan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Pislawati Alfiatturrahman, "Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kacamatan Ukui Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Valuta* 2, no. 2 (Oktober 2016); 257, <https://core.ac.uk/download/pdf/322503152/pdf&ved>, pada tanggal 10 November 2021 Pukul 08.30

Perancangan pembangunan kampung adalah satu proses peringkat aktiviti yang dianjurkan oleh pemerintah kampung dan melibatkan BPD dan elemen masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan dan memperuntukkan sumber kampung demi mencapai matlamat pembangunan kampung.<sup>18</sup> Perancangan pembangunan kampung perlu memberi perhatian kepada sifat dan sifat kampung yang pastinya berbeza dengan otonomi daerah.

Perancangan pembangunan perlu mendapat sokongan dan penyertaan serta peranan aktif masyarakat kerana tanpa penglibatan masyarakat, kerajaan akan menghadapi kesukaran untuk mengetahui apa yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Perancangan pembangunan bertujuan untuk memperbaiki keadaan hidup rakyat ke arah yang lebih baik.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perancangan sebagai kunci utama dalam melaksanakan pembangunan, nilai-nilai penyertaan rakyat dalam pembangunan tidak lenyap malah mengukuhkan Kerajaan Kampung dalam merumuskan konsep pembangunan, di mana perkara ini amat jelas kelihatan dalam Artikel. 80 ayat 1 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 bahwa konsep pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan warga desa, dan dalam merumuskan rencana pembangunan pemerintah desa wajib mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

<sup>18</sup> Agustina Setiawan et al, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung, *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (Agustus 2020): 257, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id>, 197

<sup>19</sup> Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani, "Manajemen Pemertintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (Oktober 2018); 7, [https://www.researchgate.net/publication/334528806\\_MANAJEMEN\\_PEMERINTAHAN\\_DALAM\\_PEMBANGUAN\\_DESA\\_DI\\_DESA\\_LEMAHABANG\\_KECAMATAN\\_LEMAHABANG\\_KABUPATEN\\_KARAWANG](https://www.researchgate.net/publication/334528806_MANAJEMEN_PEMERINTAHAN_DALAM_PEMBANGUAN_DESA_DI_DESA_LEMAHABANG_KECAMATAN_LEMAHABANG_KABUPATEN_KARAWANG), pada tanggal 10 November pukul 11.00

Dalam perancangan pembangunan kampung, bukan sahaja memikirkan keadaan kampung, kampung mestilah selaras dengan pengaturcaraan pembangunan daerah dan bandar, dan dalam penyediaan perancangan pembangunan ia mestilah berjangka panjang. RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 1 huruf a, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Maksudnya, perancangan pembangunan kampung telah mencapai matlamat yang diharapkan. Dalam menjalankan operasinya dimasukkan dalam rancangan kerja tahunan dalam bentuk RKP Kampung. Rancangan pembangunan merupakan teras kepada semua kaedah, dengan perancangan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan kampung dapat diukur dan lebih baik serta berjangka panjang.

Menurut pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014, rancangan pembangunan desa dikelompokkan kepada 4 bahagian iaitu:

- 1) Sektor Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - a) Penetapan dan penegasan batas desa
  - b) Pemasukan desa
  - c) Penyusunan ruang desa
  - d) Pengelolaan data desa
  - e) Penerapan perencanaan desa
  - f) Melaksanakan penilaian tingkat pembangunan pemerintahan desa
  - g) pelaksanaann kerja sama antar desa
  - h) Pembangunan alat serta prasarana kantor desa
  - i) Aktivitas lainnya sesuai dengansituasi desa

## 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

### a) Pembangunan, pemanfaatan serta perawatan infrastruktur

lingkungan desa meliputi:

- (1) Tambatan perahu
- (2) Jalan perumahan
- (3) Jalan desa antar pemukiman ke daerah pertanian
- (4) Pembangkit tenaga mikrohidro
- (5) Lingkungan permukiman masyarakat desa, dan
- (6) Prasarana desa lainnya sesuai kondisi desa.

### b). Pembangunan, pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana

kesehatan, antara lain:

- (1) Air bersih berskala desa
- (2) Kebersihan lingkungan
- (3) Pelayanan kesehatan desa semacam posyandu
- (4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang cocok dengan situasi

Dalam menata rencana pembangunan jangka menengah desa, mejadi pedoman dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang disusun oleh kepala desa sesuai dengan realisasi visi misi dan tentunya warga wajib terlibat dalam proses penyusunan tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mukhtar Hadisaputra “Perencanaan Pembangunan Desa” 9 maret 2018. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/perencanaan-pembangunan-desa-a-mukhtar-hadisaputra/> 06 J anuari 2022

## 2. *Pembangunan Dan Infrastruktur*

### a. Pembangunan

#### 1) Pengertian Pembangunan

Pembangunan jika dipandang secara luas bermakna sebuah proses menuju perubahan dari kondisi tatanan kehidupan yang belum baik ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan merupakan sebuah upaya yang bersifat global yang artinya seluruh manusia di seluruh kawasan perlu menjalankan pembangunan demi mencapai kehidupan yang lebih baik atau sejahtera.

Kemajuan yang ingin diraih oleh pembangunan lebih diartikan sebagai kemajuan dibidang ekonomi. Kesadaran akan pentingnya pembangunan dilatarbelakangi oleh situasi di sebagian wilayah dunia yang mengalami keterbelakangan (*underdevelopmen*).<sup>21</sup>

Seluruh sistem politik, sosial, ekonomi infrastruktur, pertahanan, pendidikan teknologi, pembangunan dan budaya di pengaruhi oleh pembangunan yang merupakan proses perubahan. Pembangunan juga biasanya ditakrifkan sebagai satu siri usaha untuk merealisasikan pertumbuhan terancang dan sadar serta perubahan yang diambil oleh sesebuah negara bangsa ke arah kemodenan dalam konteks pembinaan negara bangsa.

---

<sup>21</sup> Muhammad Hasan Et All, *Ekonomi Pembangunan* , (JBandunga: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 20

Konteks pembangunan sesuatu kawasan biasanya ditakrifkan sebagai satu rangkaian usaha yang disengajakan dan terancang yang dijalankan oleh sebuah negara untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan<sup>22</sup>.

Semasa mengejar pertumbuhan ekonomi yang pesat, mengatasi ketidak samaan pendapatan, dan mengurangkan kemiskinan, pembangunan adalah proses *Multi-Fase* yang melibatkan perubahan asas dalam struktur sosial, sikap dan adat negara. pembangunan berusaha membebaskan diri dari empat belunggu yaitu kejahatan, kemiskinan, kerusakan dan paksaan serta analisis untuk memenuhi empat keperluan asas yaitu kesejahteraan ekonomi, kebebasan dan pertumbuhan individu yang menekankan kepada pemenuhan hak asasi dan hak asasi manusia.

Pembangunan menitik beratkan pemenuhan hak asasi manusia yang bermaksud pembangunan bertujuan memenuhi empat keperluan asas iaitu kemakmuran ekonomi, kebebasan dan jati diri serta membebaskan diri daripada empat belunggu keganasan iaitu kemiskinan, kemusnahan, tekanan dan pakatan.<sup>23</sup>

## 2) Tujuan Pembangunan

Pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan masyarakat adil dan makmur, serta pemerataan kesejahteraan jasmani dan rohani. Semua itu berlandaskan dengan aturan negara dalam keadaan yang merdeka, berdaulat, bersatu dan wewenang rakyat dalam kondisi kehidupan bangsa yang aman, damai, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang bebas, ramah,

---

<sup>22</sup> Fikri Nurul Azmi, Skripsi, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Petaling Tahun 2015 Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi” (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 16

<sup>23</sup> Murba, Skripsi, “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 16

tertib serta rukun. Tidak hanya itu, pembangunan juga memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Di mana tujuan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Sedangkan tujuan pembangunan jangka panjang merupakan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang secara langsung dilakukan melalui kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan yang berbasis pada pengembangan lingkungan, pengembangan usaha dan pengembangan manusia, serta dengan cara tidak langsung adalah meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan nasional.

Ukuran Keberhasilan Pembangunan menurut Safi'i yang di kutip oleh Fitrah Anugrah Ritonga dalam skripsinya mengatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ialah pemberantasan kemiskinan, yaitu ukuran keberhasilan pembangunan yang diukur dengan sejauh mana usaha pembangunan dapat mengurangi kemiskinan. Ukuran kemiskinan itu sendiri bermacam-macam, tetapi secara umum berdasarkan kerangka pemikiran bahwa seseorang itu harus mencapai tahap tertentu untuk menjalani kehidupan yang layak dan menjalankan aktivitas untuk meningkatkan taraf hidupnya. Taraf hidup yang bebas tanpa mengandalkan orang lain/ pihak lain. Definisi kehidupan yang layak juga memiliki makna seseorang harus berada jauh dari garis kemiskinan yang secara ringkasnya diartikan sebagai mempunyai pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

## b. Infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas yang memungkinkan adanya kegiatan ekonomi dan pasar seperti jaringan transportasi, komunikasi dan distribusi, utilitas, air, saluran air dan sistem persediaan energi. Infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi yaitu keberlanjutan fisik, berkembangnya pusat kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur merupakan *Public Service Obligation*, yaitu kewajiban pelayanan publik bagi pemerintah karena infrastruktur merupakan prasarana publik paling penting dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu Negara. Ketersediaan infrastruktur juga sangat menentukan tingkat keefesienan dan keefektifan kegiatan ekonomi serta merupakan syarat agar perputaran roda perekonomian berjalan dengan baik.<sup>24</sup>

Infrastruktur Pada dasarnya ialah aset pemerintahan yang dibangun dengan konteks kebijakan kepada masyarakat. Infrastruktur juga merujuk kepada sistem fizikal. infrastruktur itu sendiri merupakan syarat untuk pembangunan sektor-sektor lain dan sarana untuk membina hubungan timbal balik. Infrastruktur juga berfungsi untuk menyediakan rangkaian elektrik, sumber tenaga dan

---

<sup>24</sup>Purwanto Widodo et al, "Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota dan Kabupaten Pulau Jawa, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*23, no. 1 (11 Novembbber 2020): 5, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id>.



kemudahan pengeluaran lain agar dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat pembangunan negara.<sup>25</sup>

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer yang mengandung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.

Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh departemen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.<sup>26</sup>

Infrastruktur merupakan faktor pendukung utama fungsi-fungsi sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka infrastruktur secara jelas merupakan fasilitas dan struktur fisik yang dibangun guna berfungsinya sistem sosial dalam sistem ekonomi menuju pada keberlangsungan dan berkelanjutan aktivitas masyarakat dimana infrastruktur fisik memwadhahi interaksi aktivitas manusia dengan lingkungannya.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur

---

<sup>25</sup> Fitrah Anugrah Ritonga, "Efektifitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupatenupaten Labuhanbatu" Skripsi, Universitas Sumatra Utara Medan, 2017,

<sup>26</sup>Nur Fitra, Ikhwan Hamdani, dan Abrista Dwi, "Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah Terhadap Infrastruktur Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Progres PDGs". *Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, nomor 1 (2022): 706, <https://ejournal.laaroiba.ac.id>, 8

dasar, peralatan-peralatan, instansi-instansi yang di bangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.<sup>27</sup>

Sistem infrastruktur merupakan tunjang utama kepada fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan seharian masyarakat. Sistem infrastruktur itu sendiri boleh ditakrifkan sebagai kemudahan atau struktur asas, peralatan, institusi yang dibina dan diperlukan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat..

Usman berpendapat bahwa secara umum infrastruktur dapat di definisikan sebagai prasarana dasar bagi kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan yang di sediakan oleh masyarakat.

Voughn dan pollar, menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembangunan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum dan juga termasuk sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan.

Jafar mengatakan bahwa infrastruktur memilikim peran positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membatu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan hidup, mendukung pusat ekonomi dan meningkatkan pusat mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktivitas infestor dalam dan luar negeri.<sup>28</sup>

Ada empat alasan pokok yang dapat di kemukakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur.

<sup>27</sup> Aram Palilu, *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestil Regional Bruto*, (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2022), 26

<sup>28</sup> Fikri Nurul Azmi, Skripsi, “*Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Petaling Tahun 2015 Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*” (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019),16

1. Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu nilai penting dan langkah ke arah terciptanya negara yang adil dan makmur.
2. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi dan infrastruktur sains secara langsung akan mempengaruhi iklim investasi. Pertumbuhan kapital dan investasi sangat di pengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung baik pada zona kapet, kawasan industri, pelabuhan, perpasaran dan perguruan tinggi yang dapat mendorong penemuan-penemuan baru dibidang sains dan dapat di terapkan oleh kalangan industri dan pelaku pasar.
3. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat satu daerah degan daerah lain.
4. Pembangunan infrastruktur akan mebuca isolasi fisik dan nonfisik di sejumlah wilayah. Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang sosial dan ekonomi. Tantangan bagi pemerintah ialah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik daerah di indonesia sebab isolasi fisik akan membawa dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi pada wilayah-wilayah, karena isolasi wilayah sehingga hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sulit di pasarkan ke lokasi terdekat.

Infrastruktur jalan penting di Desa Lumaring karena jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan bangunan lainnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada

di permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.<sup>29</sup>

Penyelenggaran jalan adalah kegiatan yang meliputi peraturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, serta pengoprasian dan pemeliharaan jalan.

The Word Bank membagi Infrastruktur menjadi 3, yaitu:

a. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial di sini meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi

b. Infrastruktur Administrasi

Infrastruktur administrasi termasuk undang-undang pengelolaan dan penyelarasan. Memberi perhatian kepada aspek yang abadi agar dalam jangka panjang terwujudnya infrastruktur haruslah berlandaskan prinsip akauntabilitas yang terintegrasi dan memberi perhatian kepada aspek keterampilan dan keadilan.

Infrastruktur jalan merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dengan ketersediaan jalan yang baik akan memudahkan distribusi barang dan orang sehingga biaya distribusi lebih rendah dan harga dapat bersaing di pasar. Keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan akan membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Kelancaran transportasi darat

---

<sup>29</sup>Fikri Nurul Azmi, Skripsi, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Petaling Tahun 2015 Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi” (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 18

ditentukan oleh kualitas dan kuantitas panjang jalan yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain.

Maka pembangunan infrastruktur di Desa Lumaring yang akan dibincangkan dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur jalan raya yang menjadi akses utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi.<sup>30</sup>

### 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagaimana yang disampaikan oleh Edward dan Grindle menjadi kajian yang dapat menjadi kajian teori untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan itu dapat berjalan baik dan berhasil baik. Menurut Edward implementasi kebijakan cenderung akan berhasil dan efektif setidaknya dilihat dari empat faktor yakni dari komunikasinya, sumberdayanya, sikap (*attitud*) dan struktur birokrasinya, sedangkan menurut Grindle keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi dua variabel besar yaitu isi dari suatu kebijakan dan lingkungan dari implementasi kebijakan tersebut.<sup>31</sup>

Implementasi dasar merupakan peringkat yang sangat penting dalam keseluruhan struktur dasar. Peringkat ini menentukan adanya dasar yang di pakai oleh pemerintahan benar-benar boleh dilaksanakan di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan hasil seperti yang direncanakan. Untuk dapat merealisasikan output dan keputusan yang telah ditetapkan, asas dasar perlu

<sup>30</sup>Murba, Skripsi, “*Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 18-19

<sup>31</sup> Siti Mahpuzah et All, “Implementasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Prenyesuaian/Inpassing Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan ”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 6, nomor 1 (2022),: 3, <https://ejournal.sttiatabalog.ac.id/index.php/PubBis>

dilaksanakan kerana jika tidak dilaksanakan maka asas tersebut hanya akan menjadi rekod elit seperti yang ditegaskan oleh Oduji yang mengatakan bahawa pelaksanaan dasar itu penting, bahkan mungkin lebih penting dari pelaksanaan yang membuat dasar keamanan hanya akan berbentuk mimpi atau rancangan yang baik yang tersimpan rapi dalam arsip yang tidak dilaksanakan.<sup>32</sup>

Pelaksanaan dasar mengaitkan objektif dasar dan realisasinya dengan hasil aktivitas negara adalah dengan pandangan Van Meter dan Horn Grandle berkata, tugas pelaksanaan adalah untuk membina rangkaian yang mengizinkan objektif dasar kebanyakan direalisasikan melalui aktivitas perwakilan negara yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Implementasi adalah satu proses dinamik yang melibatkan usaha berkesinambungan untuk mencapai apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Keberhasilan atau kegagalan suatu dasar akhirnya ditentukan pada peringkat pelaksanaan. Selalunya didapati proses perancangan dasar yang baik pun tidak dapat menjamin kejayaan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan secara asasnya adalah usaha untuk memenuhi apa yang sepatutnya berlaku setelah program tersebut dilaksanakan.

Untuk dasar mudah, pelaksanaan hanya melibatkan satu agensi, satu badan yang berfungsi sebagai pelaksana, contohnya dasar panitia sekolah untuk menukar asas pengajaran di dalam ruang kelas. Sebaliknya, bagi dasar mikro

---

<sup>32</sup> Murba, Skripsi, “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 20

seperti dasar pengurangan kemiskinan, usaha pelaksanaan akan melibatkan berbagai institusi seperti birokrasi pemerintahan daerah, permukiman dan desa.

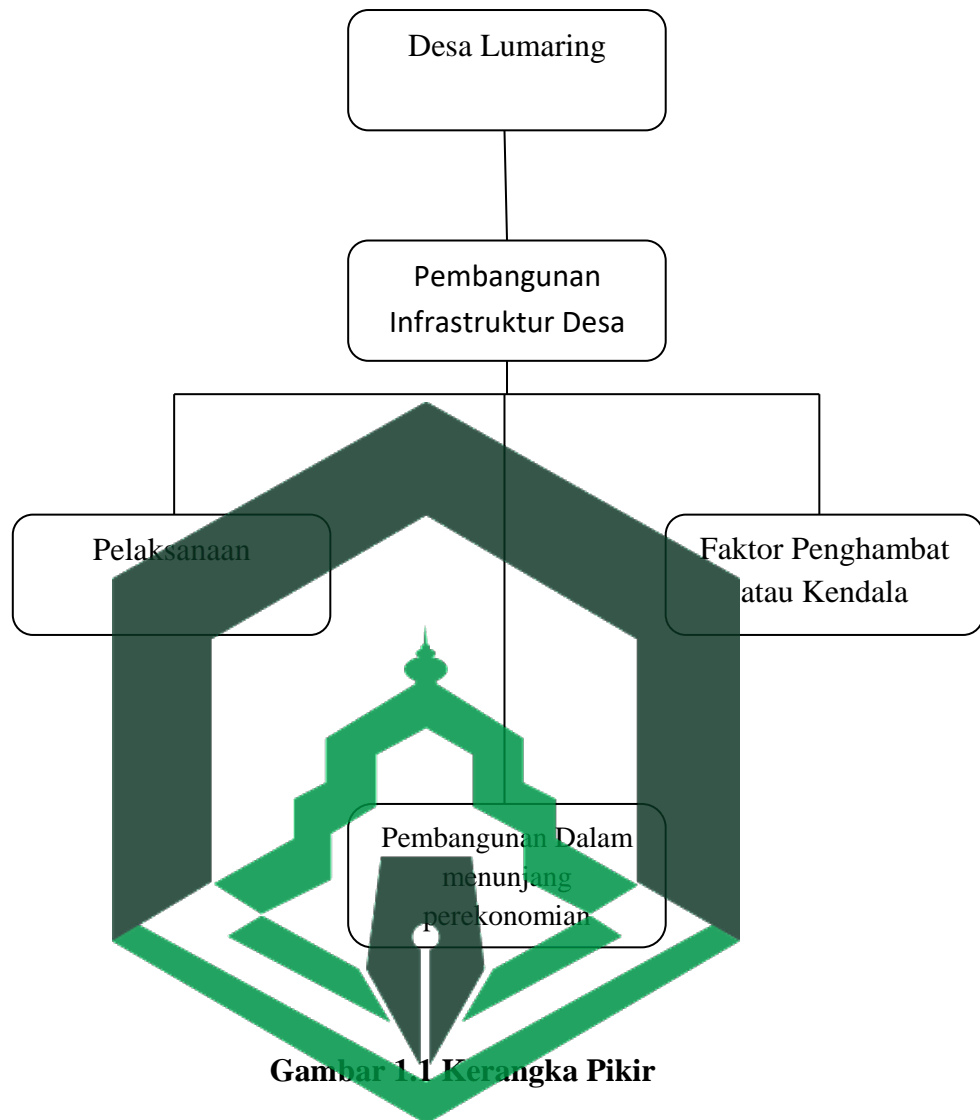
Konsep pelaksanaan dasar adalah konsep yang mempunyai berbagai perspektif yang berbeda sehingga agak rumit untuk menentukan batas yang pasti. pelaksanaan dasar pemerintahan ditentukan oleh banyak faktor dan setiap faktor ini saling berkaitan antara satu sama lain. Untuk memperkayakan pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait dalam implemetasi.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Ahmad Mustanitr dan Darmiah, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan DiDesa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinderang Rappang". *Jurnal Politik Provetik* 4, no 2 (2016) : 228, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>

e. *Kerangka Pikir*



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alam. Temuan penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Berdasarkan jenisnya penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan atau field reserch, yang mengacu pada penelitian yang terjadi di dunia nyata. Dalam penelitian lapangan ini data yang berkaitan dengan program pemberdayaan pada infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat tentang strategi optimalisasi pembangunan desa di kumpulkan dari lokasi penelitian atau lapangan.

Penelitian ini juga memanfaatkan penelitian kepustakaan selain penelitian lapangan. Pengumpulan data dan informasi menggunakan berbagai jenis literatur yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian kepustakaan Membaca, mempelajari, dan mencatat materi dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini.

Karena merupakan penelitian deskriptif, data di sajikan, dianalisis, dan di interpretasikan di daerah-daerah di mana penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada dengan menggunakan data. Dengan membuat catatan selama wawancara dalam penelitian lapangan untuk mengumpulkan data lapangan.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, edisi 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), 9

## ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian agar memperoleh data atau hasil yang di inginkan. Waktu yang digunakan peneliti yakni pada 19 September s/d 19 Oktober 2022

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Peneliti memilih tempat ini karena ingin mengetahui bagaimana implementasi pembangun yang dilakukan di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabuten Luwu

## ***C. Definisi Istilah***

Untuk menghindari penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah yang terkandung dalam judul skripsi, maka penulis telah mencantumkan definisi istilah dalam penelitian ini dengan judul “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)” dengan pengertian antara lain:

### **1. Implementasi**

Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.<sup>2</sup> Impelentasi juga merupakan praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau

---

<sup>2</sup> Yoga Saputra, Implementasi-Arti, Pengertian dan Penjelasan. <https://www.google.com/amp/s/saintif.com/implementasi-adalah/amp/>

tujuan apapun. Adapun tujuan dari rencana implementasi yaitu adalah untuk menerapkan strategi.<sup>3</sup>

## 2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa merupakan pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan desa maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan.<sup>4</sup>

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang dikumpul dan diperoleh secara langsung oleh organisasi atau individu dari objek dan merupakan sumber data utama.<sup>5</sup> Penulis penelitian ini memperoleh data primer dari penduduk Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu untuk penelitiannya, data merupakan data yang telah dikumpulkan dan oleh pihak lain biasanya dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data primer yang digunakan pengkaji untuk mencari keterangan tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

<sup>3</sup>Imelda Rahma, Implementasi Tindakan Merealisisikan Rencana, Ketahui Pengertian Dan Contohnya, 13 April 2021. <https://m.fimela.com/lifestyle/read/4531029/implementasi-adalah-tindakan-merealisisikan-rencana-ketahui-pengertian-dan-contohnya>

<sup>4</sup>Andi Usnudin, "Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Deangan Pelibatan Masyarakat Setempat", *Jurnal SMARTek* 7, no. 4 (November 2018): 293, <https://core.ac.uk/download/pdf/297228102.pdf&ved>

Benyamin Lakitan, *Metode Penelitian*, (Indralayana: Universitas Sriwijaya, 2016), 77<sup>5</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, data untuk penelitian ini diperoleh dari buku, internet dan dokumen-dokumen di instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti..<sup>6</sup>

### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi yang di sengaja dan metodis terhadap fenomena sosial dan gejala psikologis yang kemudian di dokumentasikan yang disebut observasi. Perekaman data observasi melibatkan lebih dari sekedar mencatat tetapi juga termasuk mempertimbangkan situasi dan kemudian menyelidiki skala bertingkat. Alat-alat seperti kamera, perekam kaset audio, dan kaset vidio dapat di gunakan untuk mengamati peristiwa yang kompleks.<sup>7</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara terus dengan mempertanyakan masalah yang terkait dengan penelitian kepada responden. Wawancar disini maksudnya melakukan pembicaraan secara langsung antara peneliti dan responden dimana katifitasnya dilakukan secara lisan dan tatap muka.

<sup>6</sup> Benyamin Lakitan, *Metode Penelitian*, (Indralayana: Universitas Sriwijaya, 2016), 77

<sup>7</sup> Suharani Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2017), 229-230

### 3. Dokumentasi

Mencari informasi tentang hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang pembangunan infrastruktur Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dari perangkat desa yang terlibat di dalamnya.

### ***F. Pemeriksaan Keabsahan Data***

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dipakai untuk menentukan keobjektifan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, serta uji confirmability.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian memakai uji kredibilitas. Di mana uji kredibilitas ini merupakan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan begitu informasi yang valid merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Data hasil penelitian menggunakan uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi, analisis kasus negative, dan *member check*.

Triangulasi ialah metode pengumpulan informasi yang mencampurkan bermacam metode pengumpulan informasi dan sumber data yang telah ada. Dalam pengujian kredibilitas triangulasi diartikan selaku pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Triangulasi tidak cuma dipakai

untuk mencari ketenangan tentang beberapa fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah di temukan.informasi yang dipakai dalam triangulasi yaitu:

### 1. Triangulasi sumber

Ialah keabsahan informasi yang diperoleh agar mendapatkan data yang pas, maka peneliti melaksanakan perbandingan melalui pengecekan ulang terhadap suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berlainan, agar memperoleh data yang berbeda dan hasil yang akurat maka peneliti melakukan wawancara terhadap kepala desa, aparatur desa dan masyarakat. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data di lakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah didapatkan dari beberapa sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan meminta kesepakatan dengan informan.

### 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode di lakukan guna melengkapi kekurangan informasi yang di peroleh dengan cara *ricek cross cek* kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan metode tertentu. peneliti membandingkan melalui data hasil pengamatan dan hasil wawancara, kemudian diperkuat dengan dokumentasi dan melalui teori-teori yang terkait dengan tema penelitian. Triangulasi metode dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan mana data yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karna sudut pandang yang berlainan.

### 3. Triagulasi waktu

Waktu yang dipakai untuk menguji keabsahan data dengan melaksanakan pengamatan dan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Tujuan dari triagulasi waktu adalah buat mengetahui lapangan<sup>8</sup>

#### *f. Teknik Analisa Data*

Setelah berbagai data dikumpul, kemudian untuk menganalisis teknik analisis deskriptif digunakan yaitu teknik memperhatikan atau menjelaskan data berkaitan perbincangan, di mana teknik ini menerangkan strategi pengoptimuman pembangunan kampung melalui pemerksaan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. Untuk mendapatkan data yang lebih tepat, data perlu diproses dengan peringkat berikut berikut:

#### 1. Editing

Editing data adalah satu proses di mana penyelidik menjelaskan, membaca, menumpukan dan melengkapkan data yang telah dikumpul. Proses penjelasan melibatkan pemberian penjelasan berdasarkan data yang telah dikumpul di lapangan oleh penyelidik saat menjalankan analisis data. Dengan penjelasan tersebut, diharapkan masalah teknikal atau konseptual tidak mengganggu proses

---

<sup>8</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta), 2017,519

analisis sehingga bisa membawa kepada subjek dalam pengambilan keputusan analisis.<sup>9</sup>

## 2. Organizing

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran yang sesuai tentang rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.<sup>10</sup>

Teknik ini merupakan langkah yang diambil setelah penyuntingan, kerana dapat memudahkan pengkaji memahami permasalahan yang ada di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Diharap pengkaji dapat memperoleh gambaran keseluruhan penggunaan pedoman ini dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Pekonomian Masyarakat. (Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)

## 3. Analisa

Menyusun dan mengorganisasikan data dari sumber penelitian dengan menggunakan teori dan menganalisis lebih lanjut hasil untuk menarik kesimpulan dapat berubah karena tidak ada.

---

<sup>9</sup> Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 135

<sup>10</sup> honatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 154



## BAB VI

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Analisis

##### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Lumaring

Lumaring merupakan salah satu desa tertua di wilayah kecamatan Larompong yang sejak era Lagaligo mempunyai andil yang sangat besar di wilayah kedatuan pada masa itu.

Dari generasi ke generasi diketahui bahwa kata Lumaring berasal daripada 2 suku kata yaitu LAO dan Mari yang berarti marilah kita bersatu dan berkumpul. Maka perkataan Lumaring bermakna MARI BERKUMPUL DAN BERSATU.

Desa lumaring nyaris hilang dari permukaan diakibatkan adanya pemberontakan DI/TII sehingga dari sekian banyaknya desa yang berada dibawah naungan diwilayah kecamatan Larompong hanya ada dua desa yang tetap berada dibawah naungan Bederah Merah Putih dan Pancasila yaitu Desa Lumaring dan Desa Komba.

Padatahun 1962 dimana pemerintahan pada saat itu dari Distrik menjadi Camat dan keamanan sedikit demi sedikit mulai pulih dan saat itu kecamatan Larompong mulai berbenah diri khususnya dibidang pemerintahan dimana kecamatan larompong telah mulai ditempati oleh masyarakatnya yang berasal dari masyarakat setempat dan tetap bergabung dengan pemerintahan RI. Khusus desa Lumaring mempunyai dua wilayah

sebelum dimekarkan yaitu desa Lumaring sendiri dan desa Rantealang, saat itu sistem pemerintahan yang berlaku camatlah yang menunjuk langsung pelaksanaan tugas Kepala Desa sehingga pada awal mulanya desa Lumaring yang merupakan salah satu desa wilyah kecamatan larompong oleh camat larompong, dapat dilihat pada tabel betrikt:

**Tabel 1.1** Sejarah Desa Lumaring

Tahun	Peristiwa	Keterangan
1964	Desa Lumaring dipimpin oleh Opu Dg. Lolo	Lumaring mulai dibuka
1982	Desa Lumaring dipimpin oleh Haddu Salama	Kepala Desa Lumaring yang kedua
1983	Kepala Desa Lumaring digantikan oleh M. Nastsiri	Kepala Desa Lumaring yang ketiga
1997	Pemilihan Kepala Desa	Dimenangkan oleh M. Yunus Said
2002	Pemilihan Kepala Desa	Dimenangkan oleh M. Bakri Surg
2007	Pemilihan Kepala Desa	Dimenagkan Oleh Aripin
2013	Pemilihan Kepala Desa	Dimenagkan Oleh Aripin, S.Sos
2020	Pemilihan Kepala Desa	Dimenagkan Oleh Aripin, S. Sos

Sumber: Buku Profil Desa 2020-2022

## 2. Kondisi Geografis

Desa lumaring terletak sekitar 949 mil atau 1.527 km dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya berada di titik koordinat  $3^{\circ} 30m28s$  LS dan  $120^{\circ} 22m9s$  BT. Secara geografis Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupatern Luwu memiliki luas wilyah  $480km^2$  denngan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Disebalah timur berbatasan dengan Kelurahan Larompong,
- b. Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Komba,
- c. Disebelah barat berbatasan dengan Desa Rantealang,
- d. Dan disebelah utara berbatasan dengan Desa Tawondu, Desa Tallang, dan Desa Buntu Barana Kelurahan Lindajang.

Secara administratif, wilayah Desa Lumaring merupakan desa dengan pegunungan/peladangan, Desa Lumaring ini sendiri terdiri dari 7 dusun, 5 rukun warga, dan 5 rukun tetangga. Secara umum Desa Lumaring terdiri atas persawahan dan pegunungan, topografi Desa Lumaring secara umum termasuk daerah berbukit dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Luamring diklasifikasikan sebagai dataran sedang dengan ketinggian  $>100-500$  MDPL.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dokomen Rencana Kerja Pemerintah Desa Lumaring Tahun 2021

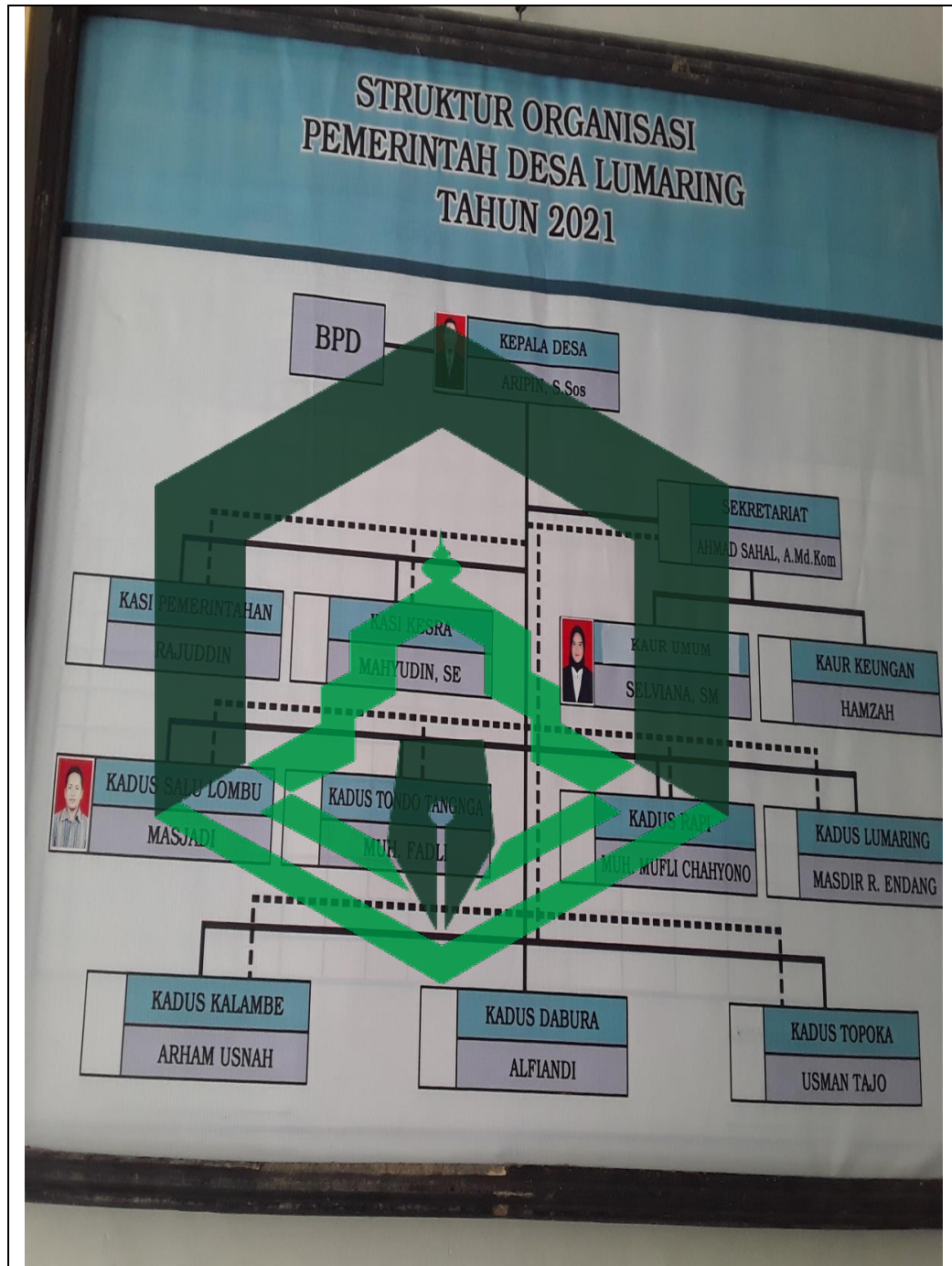
## 1. Prasarana Umum Desa

**Tabel 1.2** Prasarana Umum Desa

Jenis Prasarana	Volume (Meter/Unit)	Kondisi
Jalan Poros Desa	25 km	Baik
Jembatan	4	Baik
Taman Pendidikan Al-Qur'an	1	Baik
Gedung Tk	2	Baik
Gedung SD	2	Baik
Gedung SMP	1	Baik
Posyandu	3	Baik
Kantor Desa	1	Baik
Masjid	4	Baik
Musollah	2	Baik

Sumber: Buku Profil Desa 2020-2022

2. Struktur Pemerintahan Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu



Sumber: Buku Profil Desa 2020-2022

### 3. Kondisi Demografi

#### a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu pada tahun 2020 terdiri dari 1.868 jiwa yang terdiri atas 939 penduduk laki-laki, 929 penduduk perempuan dan 530 Kepala Keluarga (KK)

**Tabel 1.3** Penduduk Desa Lumaring Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
939 jiwa	929 jiwa	1.868 jiwa

Sumber: Buku Profil Desa 2020-2022

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa Desa Lumaring memiliki penduduk yang berjumlah 1.868 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama, tetapi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

#### 4. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan walaupun banyak masyarakatnya yang pindah kependudukan

**Tabel 1.4** Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu pada Tahun 2019-2020

Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2019	2020
Dusun Kalambe	300	308
Dusun Lumaring	315	330
Dusun Rapi	375	397
Dusun Tondo Tangga	225	231
Dusun Topoka	180	185
Dusun Saka Lumbu	178	186
Dusun Dabura	227	231
<b>Jumlah</b>	<b>1.800</b>	<b>1.868</b>

Sumber: Buku Profil Desa 2020-2022

## 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Berdasarkan Golongan umur dan jenis kelamin di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, jumlah penduduk yang berumur 18-60 tahun adalah 1.020 orang yang terdiri dari 510 orang penduduk laki-laki dan 510 orang penduduk perempuan, kemudian jumlah penduduk yang berumur 0-17 tahun sebanyak 670 orang dengan penduduk lelaki seramai 400 orang dan penduduk perempuan seramai 270 orang, manakala bilangan orang yang berumur 60 tahun ke atas ialah 178 orang. Dimana penduduk laki-laki di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu lebih banyak daripada penduduk perempuan.

**Tabel 1.5** Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin  
Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Kelompok Usia	Tahun 2020		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-6	100	120	220
7-17	300	150	450
18-45	290	300	590
46-60	220	210	430
60 Keatas	29	146	178
<b>Jumlah</b>	<b>939</b>	<b>929</b>	<b>1.868</b>

Sumber: Buku Profil Desa 2020-2022



## ***B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan***

### **1. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lumaring Kecamatan Laromponng Kabupaten Luwu Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat**

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumaring memberikan dampak yang sangat besar dalam menunjang perekonomian masyarakat karena jalan merupakan sarana transportasi utama untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III bahwa satu peringkat penting dalam kitaran dasar awam ialah pelaksanaan dasar. Pelaksanaan sering dianggap hanya sebagai pelaksana apa yang diputuskan oleh badan perundangan atau pembuat keputusan, seolah-olah peringkat ini kurang berpengaruh, tetapi pada hakikatnya peringkat pelaksanaan adalah sangat penting kerana sesuatu dasar tidak bermakna jika tidak dilaksanakan dengan betul dan betul. . Dengan kata lain, pelaksanaan ialah peringkat di mana sesuatu dasar itu dijalankan secara optimum dan dapat mencapai objektif dasar itu sendiri.<sup>62</sup>

Untuk kelancaran tugas-tugas kerajaan dan juga kelancaran aktiviti kemasyarakatan perlulah menyokong pembangunan infrastruktur yang mencukupi khususnya dalam bidang kemudahan dan prasarana, antara kemudahan dan prasarana yang paling penting ialah akses jalan yang mencukupi sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktiviti.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat penting dalam merealisasikan kemudahan pembangunan seperti perancangan

---

<sup>62</sup> Murba, Skripsi, “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone“ (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 38

pembangunan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang menyokong kelancaran pembangunan dan pembangunan sesuatu kawasan kerana tanpa infrastruktur yang mencukupi ia cenderung untuk terbantut dalam proses pembangunan malah hasilnya kurang optimum.

Ada tiga hal pokok tentang kepentingan pembangunan infrastruktur iaitu:

a.) pembangunan infrastruktur mampu menyediakan pekerjaan, b.) infrastruktur akan sangat mempengaruhi malah menentukan integrasi sosio-ekonomi penduduk sesebuah wilayah dan wilayah lain, c.) pembangunan infrastruktur akan membuka pengasingan fizikal dan bukan fizikal dalam beberapa kawasan.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian tentang bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur di desa Lumaring membuat masyarakat sedikit lega melihat kondisi infrastruktur yang sekarang sudah jauh lebih baik dan sudah lumayan memberi kemudahan akses dalam menunjang perekonomian masyarakat. Penjelasan di atas di dukung oleh hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa mengenai implementasi pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang perekonomian masyarakat yaitu Bapak Arifin, S.Sos selaku kepala Desa Lumaring Kecamatan Larompong.

“Pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian masyarakat desa dalam hal ini adalah pembangunan jalan sebagai akses utama dalam perekonomian sudah dilakukan perbaikan yang signifikan agar akses perekonomian masyarakat bisa dilakukan dengan mudah, tapi proses perbaikan ini tidak bisa dilakukan dengan cepat karena dana yang masuk untuk program pembangunan infrastruktur tidak mencukupi karena anggaran tersebut tidak difokuskan untuk satu pembangunan saja tetapi di bagi untuk program yang lainnya juga”<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Murba, Skripsi, “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 40

<sup>64</sup> Aripin, Wawancara, Kepala Desa Tabbaja, Pada tanggal 21 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aripin.,S.Sos , peningkatan pembangunan infrastuktur utamanya pada jalan sebagai akses utama dalam melakukan aktifitas ekonomi sudah dilakukan agar perekonomian masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.

Rancangan pembangunan infrastruktur menjadi bagian utama dalam pembangunan infrastruktur karena dengan adanya rancangan pembangunan tersebut akan lebih memudahkan untuk membangun infrastuktur karena dalam rancangan tersebut sudah terterta hari dan tanggal untuk melakukan perbaikan atau pembangunan pada infrastruktur yang di maksudkan agar memudahkan masyarakat dalam menggalokasikan hasil panen mereka.

Hasil wawancara dengan Ahmad Sahal selaku salah satu aparat Desa Lumaring mengatakan bahwa:

“Implementasi pembangunan di desa lumaring ini memang belumpi maksimal sekali dan masih dalam proses perbaikan ki tapi kami dari perangkat desa berusaha semaksimal mungkin untuk lakukan yang terbaik supaya aksesnya masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi jadi lebih mudah i, untuk kasi mudah pekerjaannya mereka nanti untuk isis jalan, na lakukan pembersihan di jalan sama na potong itu rumput di pinggir jalan”.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sahal di atas menjelaskan bahwa mereka selaku perangkat desa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan perbaikan terhadap infrastruktur di desa Lumaring, Kecamatan Laromponng, Kabupaten Luwu utamanya pada jalan sebagai akses utama dalam melakukan kegiatan ekonomi.

---

<sup>65</sup>Ahmad Sahal, *Wawancara*, Perangkat Desa, Pada tanggal 20 September 2022

Proses perancangan perancangan pembangunan desa dapat dipahami sebagai suatu pedoman atau model dalam menggali kemampuan serta gagasan pembangunan desa, dengan menitik beratkan pada kependudukan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Dalam penerapan pembangunan pelibatan warga sangatlah perlu dilakukan karena dengan adanya keikutsertaan masyarakat maka segala bentuk kegiatan pembangunan disuatu wilayah dapat terlaksanan sesuai dengan kebutuhan. Dan menuntut warga agar lebih mempunyai rasa tanggung jawab terutama terhadap program pembangunan yang mereka inginkan.<sup>66</sup>

Dalam wawancara dengan bapak Arifin S.Sos selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa partisipasi masyarakat cukup baik mulai dari proses perencanaan sampai pada pelaksanaan. Misalnya saat diadakan musyawarah masyarakat hadir mengeluarkan pendapat dan ketika pelaksanaan pembangunan masyarakat juga ikut andil di dalamnya.”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aparat desa dalam musyawarah desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

Hasil wawancara dengan Masjadi Selaku Kadus Salu Lombu mengatakan bahwa:

“sebelum dilakukan perbaikan atau pembangunan di desa memang di adakan musyawarah terlebih dahulu dek, di musyawarah itu mi nanti

<sup>66</sup> Mukhtar Hadisaputra “Perencanaan Pembangunan Desa” 9 Maret 2018. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/perencanaan-pembangunan-desa-a-mukhtar-hadisaputra/17> juli 2022

<sup>67</sup>Aripin , *Wawancara*, Kepala Desa Tabbaja, Pada tanggal 21 September 2022

dibicarakan apa saja yang harus diperbaiki di desa dan apa saja yang dibutuhkan di desa”.<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Masdir R Endang selaku Kadus Lumaring bahwa:

“sebelum pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dari segi manapun pasti diadakan dulu musyawarah di kantor desa dek, terus nanti pemerintah desa panggil beberapa perwakilan yang terkait untuk hadir saat dilakukan musyawarah dan dibicarakan semua mi apa yang dibutuhkan sama masyarakat di desa sampai nanti di simpulkan mi apa-apa saja yang diajukan masyarakat dalam musyawarah tersebut”.<sup>69</sup>

Hal hal serupa juga disampaikan oleh Muh. Fadli selaku kadus Tondo Tangnga mengatakan bahwa:

“iye dek sebelum dilakukan perbaikan atau pembangunan infrastruktur selalu di adakan musyawarah sama masyarakat, terus aparat desa juga selalu di undang untuk musyawarah sebelum melakukan pembangunan, di musyawarah ituni nanti di bicarakan apa-apa saja yang mau di lakukan perbaikan atau pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa”.<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan perbaikan dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah tersebut sehingga masyarakat dapat meyalurkan ide atau menyalurkan pendapat tentang apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

Setiap tahunnya pemerintah desa akan mengadakan forum musyawarah perencanaan pembangun desa atau biasa di sebut dengan MUSREMANG yang

<sup>68</sup>Masjadi, *Wawancara*, Kadus Salu Lombu, Pada tanggal 17 Juli 2023

<sup>69</sup>Masdir R Endang, *Wawancara*, Kadus Lumaring, Pada tanggal 17 Juli 2023

<sup>70</sup>Muh. Fadli, *Wawancara*, Kadus Tondo Tangnga, Pada tanggal 17 Juli 2023

dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa, pihak kelurahan dan masyarakat untuk mendiskusikan apa yang dibutuhkan di desa dan menentukan prioritas pembangunan, saat prioritas pembangunan telah tersusun dan telah disepakati oleh semua pihak kemudian diusulkan pada pemerintah tingkat pusat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Arifin selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Kalau soal usulan pembangunan yang disepakati saat musrembang itu banyak dek. Tapi tergantung lagi dari pusat usulan pembangunan mana yang di ACC. Kalau tahun kemarin itu banyak sekali yang diusulkan tapi yang di ACC dari pusat itu Cuma perbaikan jalan Dusun Tondo Tangga, pembangunan talut bronjong di Dusun Dabura sama pembangunan jembatan untuk masyarakat kurang mampu. Terus untuk perbaikan jalan sendiri terhitung dari tahun 2020-2022 itu kurang lebih 3Km di 2 Dusun.<sup>71</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program pembangunan infrastruktur di desa sudah terlaksana, perubahan-perubahan dari segala bentuk sudah terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa lumaring pemerintah sendiri telah menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa Lumaring melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegoatan pembangunan yang dilaksanakan. Dengan adanya dana desa (DD) pemerintah Desa Lumaring telah melaksanakan aktifitas perbaikan desa.

Hasil wawancara dengan Muh. Mufli Chahyono selaku kadus Rapi mengatakan bahwa:

“yang saya tau itu pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Lumaring itu perbaikan jalan untuk memudahkan akses masyarakat desa, pendirian

---

<sup>71</sup>Aripin, *Wawancara*, Kepala Desa Tabbaja, Pada tanggal 21 September 2022

posyandu yang digunakan untuk ibu hamil, imunisasi anak dan sesekali untuk pemeriksaan Kesehatan untuk lansia, pembangunan drainase, pembangunan musollah di dusun kalambe yang di gunakan untuk shalat oleh masyarakat, pemabangunan talud bronjong untuk mencegah terjadinya pengikisan tanah di area sungai kalua hujan deras atau banjir, sama pembangunan jembatan”.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berbagai upaya memang telah dilakukan pemerintah Desa Lumaring untuk meningkatkan kualitas desa agar lebih baik terutama dalam hal pembangunan infratraktur. Dan semoga kedepannya dana desa ini digunakan untuk pengembangan desa baik dsri segi fisik maupun non fisik agar Desa Lumaring jauh lebih maju lagi kedepannya.

Dana Desa merupakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari dana desa sendiri adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan alokasi dana desa dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerinthan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari alokasi Dana Desa (DD) adalah:

- a. Meningkatkan perencanaan pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan

---

<sup>72</sup>Muh. Muflī Chahyono, *Wawancara*, Kadus rapi, Pada tanggal 17 Juli 2023

- c. Meningkatkan keamanan nilai-nilai keagamaan, social, serta budaya
- d. Meningkatkan pembangunan infrastrukut pedesaan
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan kerja sama masyarakat
- f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui adan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang aktifitas masyarakat di Desa Lumaring, sebagai berikut:

- a. Perbaikan akses jalan, irigasi, mushallah, talud bronjong dan lain lain

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan dalam skala nasional. Dengan berjalannya pembangunan infrastruktur juga sangat menunjang bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya, pembangunan infrastruktur juga akan berpengaruh diberbagai sector.

Salah satu misi dari Desa Lumaring yaitu meningkatkan pembangan infrastruktur Desa, namun kondisi pembangunan di Desa Lumaring saat ini belum berjalan secara pesat hal ini dapat dilihat dr perspektif pembangunan desa yang dapat di katakn belum sepenuhnya memadai. Pada tahun 2020-2022 Desa Lumaring telah melaksanakan kegiatan pembangunan seperti perbaikan akses jalan, pembangunan drainase, pembuatan mushollah di dusun kalambe, dan pembangunan talud bronjong di Dusun Dabura.



Hasil wawancara dengan Wahyu selaku salah satu masyarakat Desa Lumaring mengatakan bahwa:

“denagan adanya perbaikan akses jalan, pembangunan drainase, pembangunan talud bronjong, pembangunan mushollah, pembangunan jembatan dan pembangunan posyandu yang dilakukan pemerintah desa lumaring dalam meningkatkan implementasi pembangunan infrastruktur desa dapat mempermudah jalannya kegiatan perekonomian Dn Kesehatan bagi masyarakat Desa Lumaring”<sup>73</sup>

Dari pernyataan diatas penulis dapat menarik kesimpulan di Desa Luamring telah dilaksanakan beberapa program pembangunan infrastruktur walaupun belum sepenuhnya maksimal.

#### b. Pembangunan sarana kesehatan

Posyandu adalah satu bentuk upaya esehatan bersumber daya masyarakat ayang dikelolah dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan Bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan Kesehatan dasar terutama dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi pada saat kehamilan, pesalinan, atau setelah persalinan. Dalam rangka meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat pemerintah Desa Lumaring menyelenggarakan program pemberdayaan esehatan masyarakat, yaitu Pematun Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sehingga jadi nilai tambah dalam program pembangunan.

Datara ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu kader posyandu mengattakan bahwa:

“kalua di Lumaring itu dek sudah di bangun posyandu, posyandu ini sendiri dipake untuk pemeriksaan Kesehatan ibu hamil sama anaknya juga, terus selain itu sering juga di pake untuk imunisasi, pemantauan gizi sama pencegahan dan penanggulan diare, kadang juga sesekali untuk pemeriksaan kesehatan untuk orang tua atau lansia, Cuma sarana dan prasarananya masih banyak ki yang kurang.”<sup>74</sup>

<sup>73</sup>Wahyu, *Wawancara*, masyarakat Desa Lumaring Pada tanggal 1 Oktober 2022

<sup>74</sup>Esse, *Wawancara*, Kader Posyandu Desa Lumaring, Pada tanggal 1 Oktober 2022

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya posyandu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang Kesehatan khususnya pada ibuhamil dan anaknya meskipun dengan sarana dan prasarana yang masih kurang.

## **2. Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lumaring Kecamatan Laromponng Kabupaten Luwu Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat**

Perkembangan suatu daerah tidak selalu mulus, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Beberapa faktor antara lain pendaan, kontur jalan dan cuaca mempengaruhi kesulitan yang sering muncul dalam pembangunan

### **a. Kontur jalan**

Kontur tanah di Desa Lumaring ini tidak semuanya keras, ada beberapa tanah yang memiliki kontur tanah yang lembek, tanah yang ada di Desa Lumaring juga tidak semuanya rata, ada beberapa jalan yang memiliki tanjakan dan turunan.

Hasil wawancara dengan Selviana selaku Kaur Umum Desa Lumaring mengatakan bahwa:

“Kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa lumarin itu karena kontur tanahnya, karena nda semua tanah di desa lumaring itu keras dek terus ada beberapa tanjakan dan turunan, kalau misalnya tidak di tangani dengan baik semuanya bisa bisan nanti itu jalan yang di buat cepat ki hancur sama rusak apalagi yang melintas di sini desa bukan Cuma kendaraan kecil, sering sekali ada kendaraan besar yang melintas”.<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Silviana, *Wawancara*, Kaur Umum Desa Lumaring, Pada tanggal 20 September 2022

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kontur jalan atau kondisi tanah adalah salah satu kendala dalam melakukan pembangunan infrastruktur karena jika kontur tanahnya tidak diperhatikan dengan baik dan seksama maka infrastruktur yang dibangun bisa saja mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang tidak lama.

### c. Cuaca

Karena merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diprediksi maka faktor cuaca sangat berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur jalan terutama pada saat hujan. Hal ini menjadikan faktor cuaca sebagai faktor penghambat pembangunan infrastruktur.

Hasil wawancara dengan Silviana selaku Kaur Umum Desa Lumaring mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat lainnya itu cuaca dek karena nda di tau itu cuaca kaya apa, karena biasa kalau jalan mi proses pembangunannya tiba tiba hujan harus dulu di hentikan itu pembanguna untuk sementara sampainya berhenti itu pembangunan”.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat lainnya adalah faktor cuaca, karena kita tidak dapat memprediksi cuaca yang akan terjadi dan ketika cuaca tidak mendukung atau hujan maka pembangunan harus di pending atau di hentikan terlebih dahulu sampai cuacanya kembali membaik.

<sup>76</sup>Silviana, *Wawancara*, Kaur Umum Desa Lumaring, Pada tanggal 20 September 2022

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lumaring maka periset menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa Lumaring dalam rangka menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di Desa Lumaring memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Lumaring meskipun masih ada beberapa pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. Adapun program pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di desa lumaring yaitu perbaikan akses jalan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, pembangunan drainase yang mempermudah masyarakat dalam menyalurkan air pada sawah dan perkebunannya, pembangunan talud bronjong yang bertujuan untuk memperkecil pengikisan tanah di pinggir sungai saat terjadi hujan deras dan banjir, pembangunan musollah untuk masyarakat agar memudahkan akses masyarakat untuk melakukan ibadah dan pembangunan posyandu untuk mempermudah pemeriksaan Kesehatan bagi ibu hamil dan anak, imunisasi, pemeriksaan gizi, dan pemeriksaan Kesehatan bagi orang tua atau lansia.
- b. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan pembangunan infrastruktur di desa lumaring di antaranya yaitu kontur jalan, dan kondisi cuaca yang tidak bisa di prediksi

## 2. *Saran*

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi pada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang perekonomian masyarakat.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil dari riset ini diharapkan menjadi satu bahan pertimbangan bagi pererintah desa dalam meningkatkan program pembagunan dan bertanggung jawab dalam mengatasi masalah perekonomian masyarakatb yang terkendala



## DAFTAR PUTAKA

Al-Hikmah, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014.

Aziz. "Otonomi Daerah Dan Pembangunan Pedesaan". *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (Desember 2016): vi. <https://ejournal.politik.lipi.go.id>.

Alfiatturrahman, Pislawati. "Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan". *Jurnal Valuta* 2, no. 2 (Oktober 2016); 257. <https://core.ac.uk/download/pdf/322503152/pdf&ved>.

Arikonto, Suharani. *Prosedur penelitian*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2017.

Azizah, Rosfa Nur. "Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)". Lampung Selatan: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Aini, Annisa Inayul. "Analisis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

A. Pantow, Indra, Sofia Pangemanan, dan Ventje Kasenda. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat (Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah* 1, no 1 (2018). <https://ejournal.unsar.ac.id>.

Aji, Irawan Purwo. *Panduan Perpajakan Dalam Belanja Desa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Azmi, Fikri Nurul. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Petaling Tahun 2015 Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi". Jambi: UIN Sultan Thaha Sifuddin Juambi, 2019.

Belareq, Florentinus. "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tiring Lama Kecamatan Tiring Kabupaten Kutai Barat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, nomor 2 (2017): 706. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>.

Firjal dan Alwadud, "Distorsi Otonomi Desa di Pulau Morotai". *Jurnal Of Governance And Local Politics* 4, no 2 (2022) <https://ejournal.unpactio.ac.id>

Fitra, Nur, Ikhwan hamdani, dan Abrista Dwi, "Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah Terhadap Infrastruktur Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Progres PDGs", *Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, nomor 1 (2022) <https://ejournal.laaroiba.ac.id>

Gunawan, Totok. *Fakta dan Konsep Geografi*. Jakarta: Inter plus, 2018.

Gustina, Wika. "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Kumpeh Ulu)". Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Hatrisno, Had. *Metode Reserch*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2018.

Mukhtar Hadisaputra "Perencanaan Pembangunan Desa" 9 Maret 2018. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/perencanaan-pembangunan-des-a-mukhtar-hadisaputra/>

Hariato, Yoga, Shulis, dan Figur Adhiyakam.. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur". *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 12, no 1 (16 April, 2021). <https://journal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/46323>.

Hardayanti, Marzellina dan Amalia Diamantina. "Urgenci Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal*

*Komunikasi Hukum* 8, no 1 (Februari 2022)  
<https://ejournal.undiksha.ac.id>

Hasan, Muhammad Et All, *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penilitin*. Jakarta: STIA-LAN, 2020.  
 Kurniawan, Wahyu dan Karjuni Dt. Maani. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Di Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Meter Carl Van Horn". *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* 1, no 4 (2019). <https://jmiap.ppi.unp.ac.id>.

Lakitan, Benyamin. *Metode Penelitian*. Indralayana: Universitas Sriwijaya, 2016.

Mustanitr, Ahmad dan Darmiah. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinderang Rappang". *Jurnal Politik Provetik* 4, no 2 (2016) : 228. [https://journal.uin-](https://journal.uin-alauddin.ac.id)

Murba. "*Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*". Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Dibidang Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (Agustus2020).  
<https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102>.

Mahpuzah, Siti, Muslih Amberi, M. Riduansyah Syafari, "Implementasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan ". *Jurnal Pemikirann dan Peneliutian Administrasu Publik dan Administrasi Bisnis* 6, nomor 1 (2022),  
<https://ejournal.sttiatabalog.ac.id/index.php/PubBis>



Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Pristianto, Djuni. *Panduan Penyusunan RPJM Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015

Purnamasari, Hanny dan Rachmat Ramdani. "Manajemen Pemertintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (Oktober 2018); 7.  
[https://www.researchgate.net/publication/334528806\\_MANAJEMEN\\_PEMERINTAHAN\\_DALAM\\_PEMBANGUAN\\_DESA\\_DI\\_DESA\\_LEMAHABANG\\_KECAMATAN\\_LEMAHABANG\\_KABUPATEN\\_KARAWANG](https://www.researchgate.net/publication/334528806_MANAJEMEN_PEMERINTAHAN_DALAM_PEMBANGUAN_DESA_DI_DESA_LEMAHABANG_KECAMATAN_LEMAHABANG_KABUPATEN_KARAWANG).

Palilu, Aram. *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto*. Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2022.

Ramdan, Badan. *Abcd Perencanaan Desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*. Jakarta: Inisiatif, 2014.

Rahma, Imelda. "Implementasi Tindakan Merealisasikan Rencana, Ketahui Pengertian Dan Contohnya" 13 April 2021.  
<https://m.fimela.com/lifestyle/read/4531029/implementasi-adalah-tindakanmerealisasikan-rencana-ketahui-pengertian-dan-contohnya>.

Rorimpandey, Megawati Cindy dan Ismail Nurdin. "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infastruktur Pedesaan (PIIP) Di Desa Lopan Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11, no 1 (Maret 2019) . <https://ejournal.ipdn.ac.id>.

Satria, Arif. *Menuju Desa 2030*. Bogor: Crestpent, 2011.

Sarwono, Jhonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, edisi 1. Bandung: Alfabeta, 2017.

Shaleh, Mahadin, Helmi Kamala, Muh. Ruslan Abdullah, Jerianto dan TakdirS, “Implementing Values of Local Wisdom in Managing the Budgets of Rular Fanancing at Poringan Village in West Suli District of Luwu Regency”. *International Journal of Current Innovations in Advenced Reseach* 2, nomor 5 (19 Mei 2019): 29, <https://www.ijciar.com/index.php/journal/article/view/111>

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, edisi 5. Jakarta: PT Asdi Mahasati, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung; CV. Alfa Beta, 2019.

Setiawan, Agustina, Utang Suwargo, dan Mudayati Rahmawati. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Desa. Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung.” *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (Agustus 2020): 257. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id>

Saputra, Yoga. Implementasi-Arti, Pengertian dan Penjelasan. <https://www.google.com/amp/s/saintif.com/implementasi-adalah/amp/>.

Usnudin, Andi. “Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat”. *Jurnal SMARTek* 7, no. 4 (November 2018): 293,. <https://core.ac.uk/download/pdf/297228102.pdf&ved>.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT . Grafindo Persada 2017.

Wijayanto, Rono, Sri Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iawahyudi, “ Pemerintahan Desa Dalam Karakteristik Otonomi Desa Di Siatem Negara Kesatuan Republik Indonesi”. *Jurnal Hukum dan*

*Pranata Sosial Islam* 4, no 2 (14 oktober 2022)  
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id>

Widodo, Purwanto, Nani Ariani, dan Yudi Nur Supriadi, “Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota dan Kabupaten Pulau Jawa, *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 1 (11 November 2020): 5, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id>



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### Instrumen wawancara

#### A. Wawancara kepada kepala desa tabbaja

1. Bagaimana sejarah berdirinya desa Lumaring?
2. Apa visi dan misi desa Lumaring?
3. Apa saja pelaksanaan pembangunan desa dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di desa Lumaring?
4. Apa saja program pembangunan desa yang sudah berjalan?
5. Dalam pelaksanaan pembangunan bagaimana partisipasi masyarakat di desa Lumaring?
6. Apakah dalam pengelolaan dana desa menggunakan system transparansi?
7. Apa saja faktor penghambat yang di hadapi dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur desa?

#### B. Wawancara kepada kaur umum dan perencanaan desa

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Lumaring?
2. Apa saja program pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Lumaring?
3. Apakah dalam melakukan program pembangunann menggunakan system transparansi?
4. Apakah dalam kegiatan pembangunan desa ada kerja sama dengan desa lain atau kecamatan??
5. Apa saja faktor penghambat pembangunan imfrastruktur di desa Lumaring?

### **C. Wawancara kepada Masyarakat Desa Tabbaja**

1. Apa saja program pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Lumaring?
2. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan di desa Lumaring?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat desa dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa Lumaring?
4. Apa keuntungan yang diperoleh dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa?
5. Apakah pembangunan infrastruktur di desa Lumaring sudah optimal?



## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. Opu Daeng Riagu No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 462/PENELITIAN/02.02/DPMP/IX/2022  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Pemohonan izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Desa Lumaring  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 271/in.19/F.EBI/PP.00.9/04/2022 tanggal 11 Januari 2022 tertang permohonan izin Penelitian.  
Dengan ini disampaikan kepada mahasiswa (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sarsena (i)  
Tempat/Tgl Lahir : Lumaring, 10 Maret 2000  
Nim : 17.0401.051  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Masa : San. Lumaring  
Desa : Lumaring  
Kecamatan : Larompong

Dimanfaatkan untuk mengadakan penelitian di daerah/instansi Sarsena (i) dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENUNJANG AKTIVITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LUMARING KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU**

yang akan dilaksanakan di KANTOR DESA LUMARING, pada tanggal 13 September 2022 s/d 19 Oktober 2022

Sehubungan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, peneliti yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyediakan 1 (satu) contoh copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dibatalkan/dimutakhirkan apabila ternyata pemegang surat izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

1202219315000483

1202219315000483

Ditandatangani di Kabupaten Luwu  
Pada Tanggal : 19 September 2022  
Kepala Dinas

  
**Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA**  
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b  
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :  
1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;  
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;  
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;  
4. Mahasiswa (i) Sarsena;  
5. Ansp.

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara





Lampiran 4 Dokumentasi



Dokumentasi dengan bapak Arifin selaku Kepala Desa Lumaring



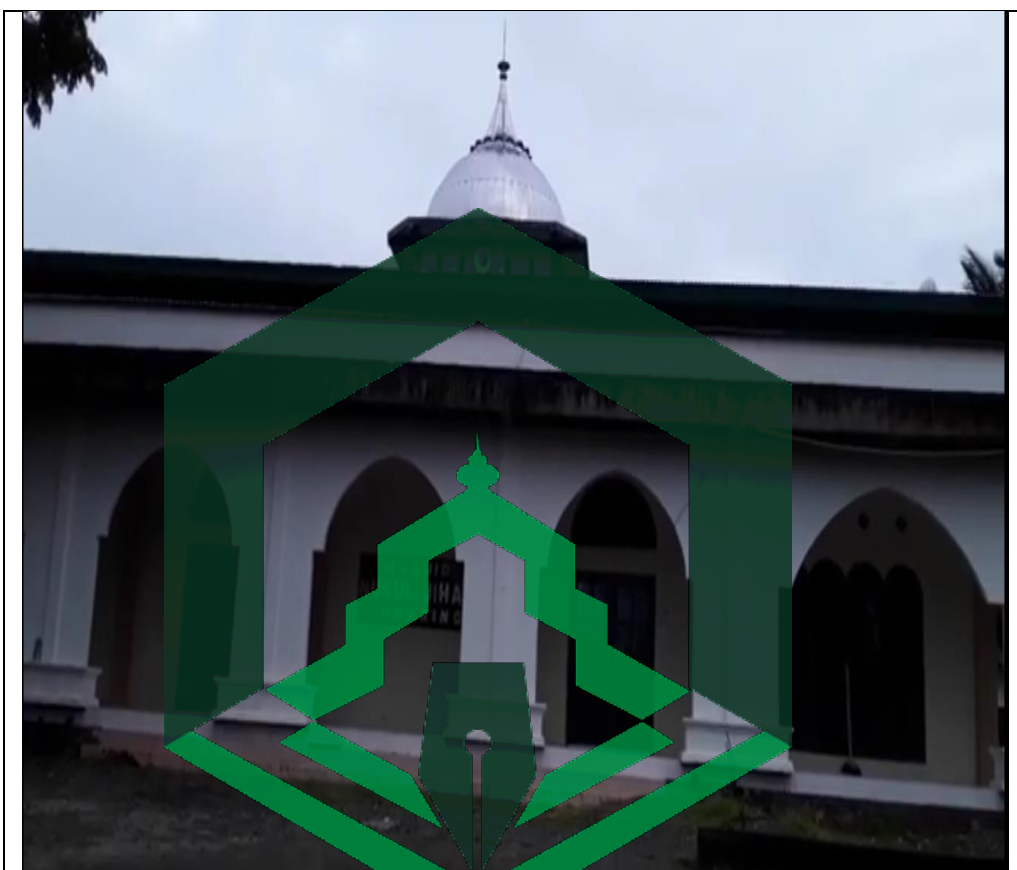
Wawancara dengan Bapak Hamzah selaku Kaur Keuangan  
Dab Ibu Silviana selaku Kaur Umum



Dokumentasi Proses  
Penimbunan Jalan



Dokumentasi Kantor  
Desa Lumaring



Dokumentasi Masjid Nurul Jihad  
Desa Lumaring



Dokumentasi Posyandu  
Desa Lumaring

## Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Humaidi, S.EI., M.EI.

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Sarsena

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wa wb*

Selanjutnya melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Sarsena

NIM : 17 0401 0051

Program Studi : Ekonomi Syariah

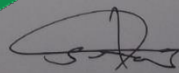
Judul Skripsi : Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Aktifitas Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)

Mengatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak digunakan untuk diujikan pada ujian matakuliah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wa wb*

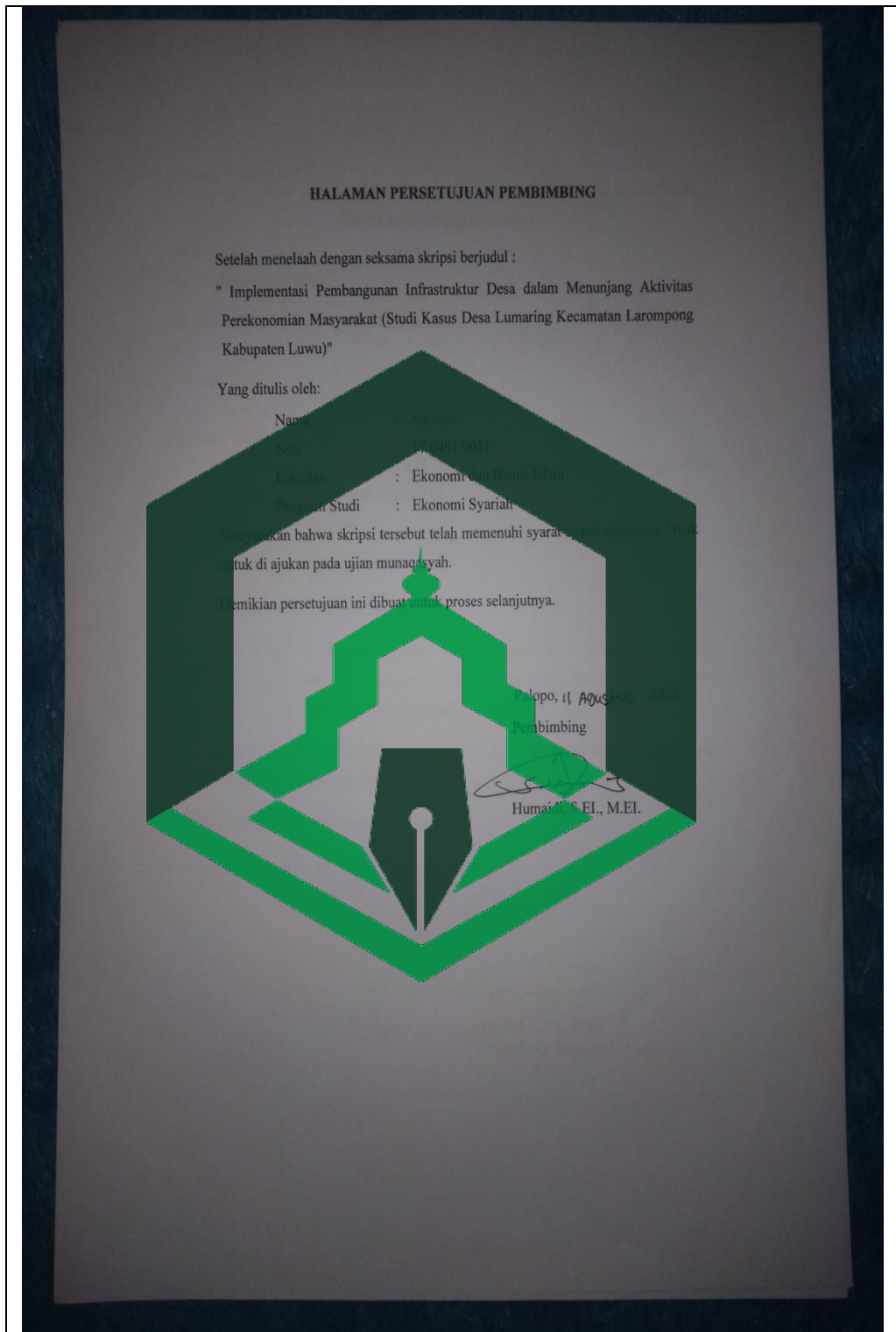
Pembimbing



Humaidi, S.EI., M.EI.

Tanggal: 11 Agustus 2023

Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing



Lampiran 7 Hasil Uji Turnitin

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
DALAM MENUNJANG AKTIVITAS PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LUMARING KECAMATAN  
LAROMPONG KABUPATEN LUWU)

ORIGINALITY REPORT

**25%** SIMILARITY INDEX  
**24%** INTERNET SOURCES  
**3%** PUBLICATIONS  
**6%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	9%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	5%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	media.heliti.com Internet Source	1%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%

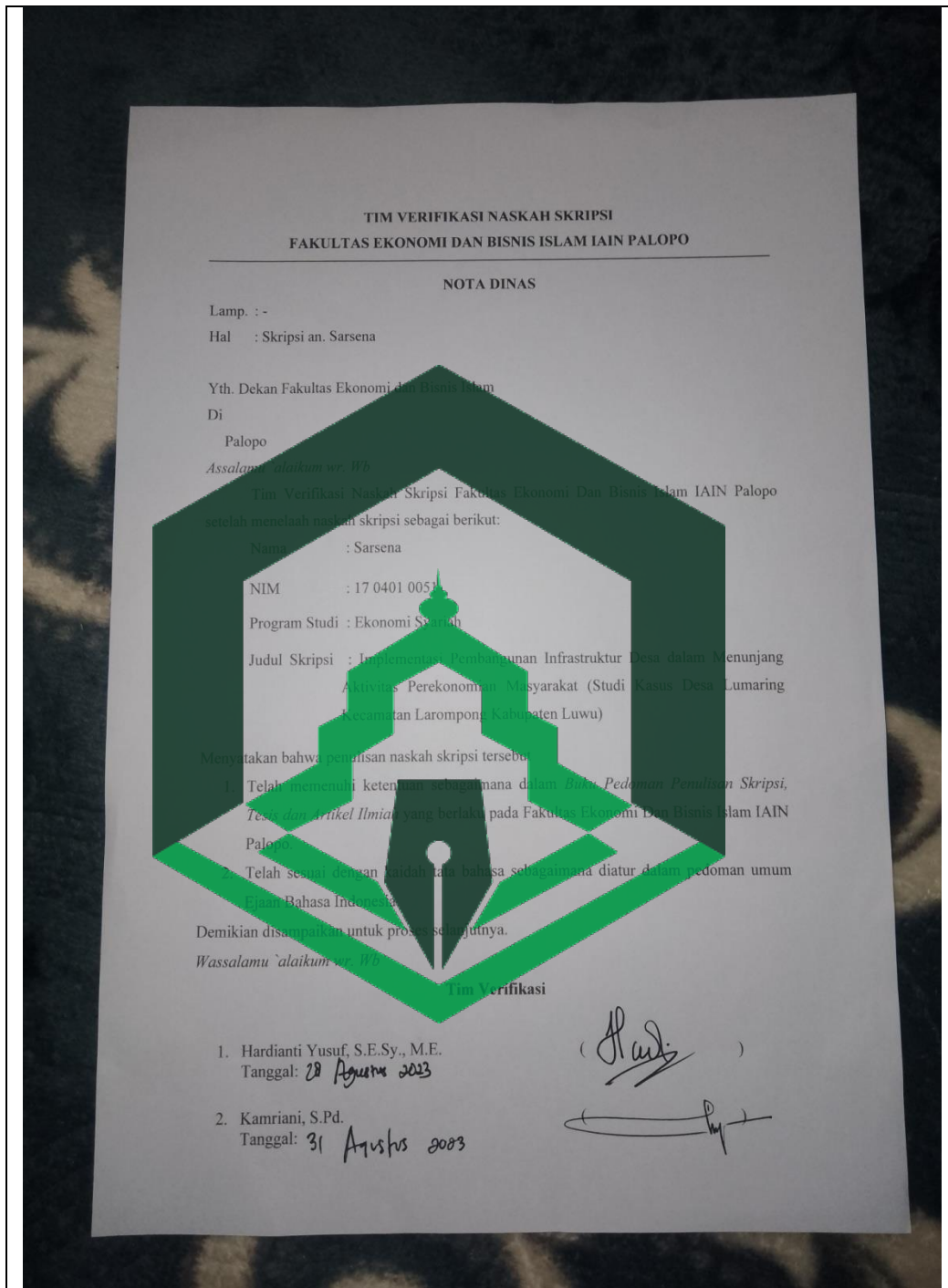
73

9	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
10	chaliel.com.wordpress.com Internet Source	<1%
11	123dok.com Internet Source	<1%
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%





Lampiran 8 Nota Dinas Tim Verifikasi Turnitin


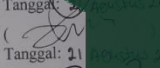
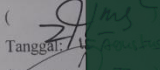
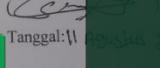


## Lampiran 9 Persetuan Tim Penguji

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Sarsena Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0051, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah telah disetujui dan disetujui dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk dipaparkan pada sidang ilmiah munaqasyah.

#### TIM PENGUJI

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.<br>Ketua sidang/Penguji | (  )<br>Tanggal: 05 Juli 2023   |
| 2. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy.<br>Penguji I               | (  )<br>Tanggal: 05 Juli 2023  |
| 3. Akbar Sabani, S.E., M.E.<br>Penguji II              | (  )<br>Tanggal: 05 Juli 2023 |
| 4. Humaidi, S.H., M.HI.<br>Pembimbing Penguji          | (  )<br>Tanggal: 05 Juli 2023 |



Lampiran 10 Nota Dinas Penguji

Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.  
Akbar Sabani, S.El., M.E.  
Humaidi, S.El., M.El.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Sarsena  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di

Palopo

Assalamu `alaikum wr. Wb

Setelah meneliti naskah perbaikan berdasarkan semua hasil penelitian terdahulu, lakukan bimbingan baik dari segi isi maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sarsena

NIM : 17 0401 0051

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Laming Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak digunakan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Assalamu `alaikum wr. wb

1. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.

Pembimbing I

Tanggal: 11 Agustus 2023

2. Akbar Sabani, S.El., M.E.

Penguji II

Tanggal: 15 Agustus 2023

3. Humaidi, S.El., M.El.

Pembimbing/Penguji

Tanggal: 11 Agustus 2023

## RIWAYAT HIDUP



**Sarsena** adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Lumaring pata tanggal 20 Maret 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hasan dan ibu Sarmila. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Penulis pertama kali menginjakkan kaki di dunia pendidikan pada tahun 2005 di SDN 8 Lumaring dan diselesaikan pada tahun 2011. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Satap Lumaring dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Larompong pada saat menempuh pendidikan SMA penulis aktif sebagai anggota OSIS dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Pramuka, Tapak Suci dan Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus SMA tahun 2017, penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Contact Person Penulis: [sarsenapurihasan@gmail.com](mailto:sarsenapurihasan@gmail.com)